PENGASUHAN DALAM KELUARGA RENTAN

Strategi, Tantangan, dan Harapan

Elyvia Prima Sakti, Jingga Septia Aulia Putri, Lindia Martha, Saffanah Nazhirah Putri Nugroho, Aila Rakmadani, Dewi Azka Tazkiyah Aula, Dinda Anugrah Imelda Fathiroh, Rafif Dhini Hendika, Nabila Mufida, Azzura Muthia Jasmine, Hilda Jeniarta Widodo, Ni Made Ayu Saraswati Dewi, Fitriani Wardha Safina, Zahro Fildatu Rohmah, Aisyah Cindy Maulani, Rinda Aulia Febrianti, Alan Sukmawati, Adelia Mifta Oktafiyanti, Dewi Malik Anggraini, Amanda Nurul Humaidah, Riyadh Nauval Athala, Zefanya Ayunda Hemadafiyanti Putri, Nurul Azmiza Bin Asis, Nadine Dwi Amrulloh, Erina Fatma Aulia, Elsa Hikmatul Qodiyah, Fetrin Aura Ainillah, Amalia Rahma Sakina Utomo, Jessica Amelia Defani, Novaliya Maharani Sfitri, Izzah Dzurrotun Nafisah, Hindi Arvita, Muyassarah

madza media

PENGASUHAN DALAM KELUARGA RENTAN

Strategi, Tantangan, dan Harapan

Edisi Pertama
Copyright @ 2025

QRCBN 62-1122-5956-403
176 h.
14,8 x 21 cm
cetakan ke-1, 2025

Penulis
Elyvia Prima Sakti,dkk

Editor
Dhian Gowinda Luh Safitri, S.Pd., M.Ed.
Prof. Dr. Dra. Gunarti Dwi Lestari, M.Si.

Penerbit
Madza Media
Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021
Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro
Kantor 2: Perum New Villa Bukit Sengkaling C4 No 13 Malang
redaksi@madzamedia.co.id
www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Pengasuhan dalam Keluarga Rentan: Strategi, Tantangan, dan Harapan hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pengasuhan dalam konteks keluarga yang menghadapi berbagai kerentanan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran krusial dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak keluarga yang berada dalam kondisi rentan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam situasi ini, tantangan yang dihadapi oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam menjalankan peran pengasuhan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat membantu keluarga rentan dalam mengatasi tantangan tersebut.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan solusi praktis bagi para orang tua, pendidik, dan semua pihak yang peduli terhadap pengasuhan anak dalam keluarga rentan. Setiap bab dalam buku ini menyajikan analisis yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang positif dan mendukung. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi pembaca dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga

rentan. Semoga upaya ini dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan harapan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Selamat membaca!

Surabaya, Juni 2025

2024G

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku *Pengasuhan dalam Keluarga Rentan: Strategi, Tantangan, dan Harapan*.

Terima kasih kepada para penulis dan peneliti yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan berharga, serta kepada semua narasumber yang telah berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Kami juga menghargai dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas yang telah memberikan motivasi dan inspirasi selama proses penulisan ini.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber referensi yang berguna bagi para orang tua, pendidik, dan semua pihak yang peduli terhadap pengasuhan anak dalam keluarga rentan. Semoga upaya ini dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

Terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 MEMAHAMI KELUARGA RENTAN **1**

A. Definisi Keluarga Rentan 1

B. Karakteristik dan Klasifikasi Keluarga Rentan Ekonomi, Sosial, Psikologis 3

1. Karakteristik Ekonomi 3
2. Karakteristik Sosial 4
3. Karakteristik Psikologis 5
4. Klasifikasi Keluarga Rentan dalam Aspek Ekonomi 5
5. Klasifikasi Keluarga Rentan dalam Aspek Psikologis 6
6. Klasifikasi Keluarga Rentan dalam Aspek Sosial 6
7. Statistik dan Data Situasional di Indonesia dan Global 7

C. Potret Keluarga Rentan 7

D. Gambaran Global tentang Keluarga Rentan 8

E. Implikasi Kebijakan 9

F. Dampak Kerentanan Terhadap Anak dan Pola Pengasuhan 10

BAB 2 TEORI DAN KONSEP DASAR PENGASUHAN (KONSEPTUAL) 13

A. Teori-Teori Pengasuhan 13

1. Teori Pola Asuh Baumrind 13
2. Teori Ekologi Bronfenbrenner 15
3. Teori Kelekatan (*Attachment Theory*) 17

B. Pengasuhan dalam Perspektif Ekologi Sosial 19

C. Perbedaan Pengasuhan Normatif vs Pengasuhan dalam Konteks Kerentanan 23

D. Konsep *Resilience* dan Peran Pengasuhan dalam Membentuk Ketahanan Anak 27

E. Rangkuman 34

BAB 3 PENGASUHAN DALAM KELUARGA MIGRAN 37

A. Konteks Migrasi: Internal (Desa-Kota), Internasional, Pekerja Migran 37

B. Dampak Migrasi pada Peran Orang Tua dan Keterpisahan Fisik 40

C. Strategi Menjaga Kedekatan Emosional dalam Jarak 44

D. Pola Komunikasi dan Peran Teknologi 47

E. Studi Kasus: Anak-Anak Buruh Migran dan TKI 48

F. Rangkuman 50

BAB 4 PENGASUHAN DALAM KELUARGA MARJINAL 51

A. Pengertian Keluarga Marjinal (Tinggal di Wilayah Kumuh, Pekerjaan Informal, dll.) 52

B. Akses Terbatas Terhadap Pendidikan, Layanan Kesehatan, dan Sosial 53

1. Akses Terbatas terhadap Pendidikan 54
2. Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan 56
3. Akses Terbatas terhadap Layanan Sosial..... 58

C. Strategi Bertahan Hidup dalam Kemiskinan dan Dampaknya pada Pengasuhan 62
1. Strategi Bertahan Hidup Keluarga Miskin 62
2. Dampak pada Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini 63
3. Solusi yang Dapat Diterapkan 64

D. Pola Asuh yang Keras dan Permisif dalam Konteks Survival 65

E. Pendekatan Komunitas untuk Menguatkan Peran Pengasuhan 69
1. Model Pendekatan Komunitas dalam Pengasuhan 69
2. Dampak Pendekatan Komunitas 70

BAB 5 PENGASUHAN OLEH ORANGTUA TUNGGAL 73

A. Tujuan Bab 73
B. Ragam Latar Belakang Orang Tua Tunggal 75
C. Beban Ganda: Emosional dan Finansial..... 77
D. Isu Keseimbangan Kerja dan Pengasuhan..... 79
E. Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Psikologis 81
F. Studi Kasus dan Cerita Reflektif 83
1. Kisah 1: Dora Herta Lisna – PRT dan Ibu Tunggal Penuh Keteguhan 84

2. Kisah 2: Wayne Toh – Ayah Tunggal Empat Anak yang Menginspirasi 85
G. Rangkuman dan Refleksi 87

BAB 6 PENGASUHAN DALAM KELUARGA PENYINTAS KEKERASAN 89

A. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pola Asuh 89
1. Disfungsi Emosional Orang Tua dan Pengaruhnya terhadap Pola Asuh 90
2. *Intergenerational Transmission of Violence* 91
3. Pola Pengasuhan Negatif: Permisif dan Autoriter 92
4. Ketidakstabilan Sosial dan Ekonomi yang Memperburuk Pengasuhan 93
5. Pentingnya Intervensi Psikososial dan Pemulihan Pengasuhan 94
6. Trauma antar Generasi 95
H. Pengasuhan Restoratif dan Pemulihan Trauma 97
I. Intervensi Psikososial dan Perlindungan Anak 97
J. Kolaborasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak 98

BAB 7 PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA DENGAN ANGGOTA DISABILITAS 103

A. Keluarga dengan Anak atau Orang Tua Disabilitas 104

B. Tantangan Emosional dan Stigma Sosial..... 106
C. Pengasuhan Inklusif dan Responsif Kebutuhan Khusus 108
D. Dukungan Komunitas dan Layanan Sosial 111
E. Peran Advokasi Keluarga 114
F. Rangkuman dan Refleksi 116

BAB 8 PENGASUHAN DALAM KELUARGA YANG TERLIBAT DENGAN HUKUM (ATPH DAN ABH)..... 119

A. Anak dan Orang Tua yang Menjadi Bagian dari Sistem Peradilan 119
B. Stigma dan Dampaknya Terhadap Relasi Keluarga 125
C. Reunifikasi dan Peran Lapas dalam Mendukung Pengasuhan 126
D. Strategi Mempertahankan Relasi Pengasuhan Selama Masa Tahanan 129
E. Rangkuman 131

BAB 9 REKOMENDASI INTERVENSI UNTUK PENGUATAN PENGASUHAN KELUARGA RENTAN..... 134

A. Prinsip-Prinsip Pengasuhan Responsif dan Berkeadilan Sosial..... 134
   1. Pengasuhan Responsif..... 135
   2. Pengasuhan Berkeadilan Sosial..... 135
   3. Integrasi Kedua Prinsip dalam Mewujudkan Pengasuhan yang Holistik dan Transformatif..... 136

B. Model Intervensi Berbasis Keluarga dan Komunitas 137
C. Pemetaan Kebijakan dan Program Pemerintah 141
D. Arah Pengembangan Kebijakan dan Praktik ke Depan 143
E. Penutup dan Refleksi Akhir 145

PENUTUP 147

DAFTAR PUSTAKA 149

BIODATA EDITOR 161



BAB 1
MEMAHAMI KELUARGA RENTAN

Nama Penulis

1. Elyvia Prima Sakti
2. Jingga Septia Aulia Putri
3. Lindia Martha
4. Saffanah Nazhirah Putri Nugroho

A. Definisi Keluarga Rentan

Kelompok rentan adalah bagian dari masyarakat yang mengalami berbagai keterbatasan, sehingga mereka kesulitan untuk menikmati kehidupan yang layak seperti orang pada umumnya. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Keterbatasan ini bisa menjadi penyebab mereka tetap dalam kondisi rentan, namun juga bisa menjadi akibat dari kurangnya perhatian terhadap mereka dalam berbagai kebijakan pembangunan. Untuk bisa membantu kelompok

rentan dengan tepat, langkah pertama yang penting adalah memetakan siapa saja mereka dan bagaimana kondisi yang mereka alami. Pemetaan ini sebaiknya dilakukan secara partisipatif, yaitu melibatkan langsung kelompok tersebut agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan nyata mereka.

Salah satu prinsip utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah "tidak meninggalkan siapa pun" (*no one left behind*). Artinya, pembangunan harus menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Namun pada kenyataannya, masih ada kelompok rentan yang belum terlibat secara penuh dan belum merasakan manfaat dari pembangunan. Hal ini bisa terjadi karena kelompok tersebut tidak dianggap sebagai prioritas, dan juga karena mereka mengalami kesulitan untuk ikut serta dalam program-program yang ada. Salah satu contoh kelompok rentan yang sering terabaikan adalah perempuan kepala keluarga. Mereka memiliki tanggung jawab ganda: sebagai perempuan yang sering kali menghadapi diskriminasi dan keterbatasan peran sosial, dan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga mereka. Kondisi ini membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dalam kebijakan pembangunan.



Gambar Ilustrasi Keluarga Rentan dengan Keadaan Ekonomi yang Lemah

B. Karakteristik dan Klasifikasi Keluarga Rentan Ekonomi, Sosial, Psikologis

1. Karakteristik Ekonomi

Berdasarkan data dan kebijakan dari Kementerian Sosial RI (2021), Badan Pusat Statistik (2023), Keluarga rentan dari sisi ekonomi biasanya memiliki pendapatan yang sangat terbatas dan tidak stabil. Mereka umumnya bekerja di sektor informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. Beberapa ciri utama meliputi:

a. Pendapatan rendah, seringkali berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah.
b. Tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu, seperti buruh harian lepas, pedagang kecil, atau pemulung.
c. Tidak memiliki aset produktif, seperti tanah, rumah, atau kendaraan yang dapat digunakan sebagai jaminan atau alat produksi.
d. Terbatasnya akses terhadap program perlindungan sosial, Misalnya BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), PKH (Program Keluarga Harapan), dan bansos lainnya.
e. Kondisi tempat tinggal tidak layak, sering kali tinggal di kawasan kumuh, dengan fasilitas dasar yang tidak memadai seperti air bersih dan sanitasi.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang tergolong dalam kelompok rentan secara ekonomi tidak memiliki cadangan sumber daya untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan ekonomi seperti

kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam.

2. Karakteristik Sosial

Selain kondisi ekonomi, faktor sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kerentanan sebuah keluarga. Menurut kajian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), karakteristik sosial keluarga rentan antara lain:

a. Minimnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar, keluarga rentan sering kali tidak memiliki jaringan komunitas atau akses ke organisasi sosial yang dapat membantu mereka dalam kondisi krisis.
b. Tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan, sehingga sulit mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
c. Status keluarga tidak utuh, seperti orang tua tunggal, anak yatim piatu, atau keluarga dengan konflik internal yang tinggi.
d. Tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah, yang menyebabkan mereka sulit mengakses bantuan pemerintah.
e. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, seperti pertemuan RT/RW, kegiatan keagamaan, atau program pemberdayaan masyarakat.

Ketika keluarga tidak memiliki posisi sosial yang kuat, mereka lebih rentan mengalami keterpinggiran, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

3. Karakteristik Psikologis

Aspek psikologis merupakan dimensi kerentanan yang sering kali luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat signifikan terhadap stabilitas keluarga. Menurut Astuti (2019) dalam jurnal kesejahteraan sosial, keluarga yang rentan secara psikologis memiliki ciri sebagai berikut:

a. Adanya tekanan emosional yang berkelanjutan, akibat masalah ekonomi, sosial, atau peristiwa traumatis.
b. Tingginya tingkat stress dalam keluarga, baik pada orang tua maupun anak-anak, yang dapat menyebabkan konflik rumah tangga.
c. Kurangnya kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara sehat, sehingga sering terjadi pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga.
d. Anak-anak menunjukkan gejala gangguan perilaku, seperti penarikan diri, agresivitas, atau kesulitan belajar di sekolah.
e. Minimnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa, baik karena ketidaktahuan, stigma, maupun keterbatasan fasilitas di daerah tempat tinggal.

Kerentanan psikologis bisa memperburuk kondisi ekonomi dan sosial keluarga jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

4. Klasifikasi Keluarga Rentan dalam Aspek Ekonomi

Keluarga yang tergolong klasifikasi ini berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang serius dan tidak

mampu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah maupun lembaga sosial lainnya sangat tinggi. Keluarga-keluarga dalam kelompok ini menjadi fokus dalam program pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga, serta jaminan sosial bersubsidi.

5. Klasifikasi Keluarga Rentan dalam Aspek Psikologis

Keluarga yang termasuk dalam klasifikasi ini mengalami tekanan psikososial, seperti disfungsi hubungan keluarga, beban emosional yang tinggi, atau ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi pengasuhan yang sehat, meskipun sering kali tersembunyi, kerentanan psikologis berdampak besar terhadap kualitas kehidupan rumah tangga dan tumbuh kembang anak. Penanganan biasanya melibatkan pendekatan konseling keluarga, edukasi kesehatan mental, dan layanan pemulihan trauma.

6. Klasifikasi Keluarga Rentan dalam Aspek Sosial

Klasifikasi ini mencakup keluarga yang mengalami ketertinggalan dalam integrase sosial, baik karena keterbatasan akses layanan publik maupun karena adanya hambatan struktural dalam masyarakat. Keluarga migran, masyarakat adat yang terpinggirkan, dan korban relokasi sering kali masuk ke dalam kategori ini. Upaya penanganan terhadap kelompok ini melibatkan strategi pembangunan sosial yang inklusif serta penguatan kapasitas komunitas lokal.

7. Statistik dan Data Situasional di Indonesia dan Global

Keluarga adalah komponen penting masyarakat yang memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan emosional kepada setiap anggota keluarga. Namun, beberapa keluarga memiliki kapasitas yang berbeda untuk melakukan tugas tersebut. Rumah tangga yang menghadapi tantangan struktural dan multidimensional dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi keluarga secara efektif disebut sebagai keluarga rentan. Faktor ekonomi (kemiskinan), biologis (disabilitas), demografis (usia lanjut dan anak-anak), sosial (status perempuan sebagai kepala keluarga), dan alami (bencana alam, pandemi, atau konflik sosial) adalah beberapa contoh keterbatasan ini.

C. Potret Keluarga Rentan

Banyak keluarga di Indonesia dianggap rentan. Lebih dari 12 persen rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas termasuk dalam kategori miskin ekstrem, menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 (Azanella & Marlina, 2023). Hal ini menunjukkan bagaimana keterbatasan fisik atau mental menjadi penghalang untuk masuk ke sekolah, bekerja, dan mendapatkan layanan kesehatan, yang meningkatkan perbedaan sosial ekonomi.

Kelompok orang tua juga mengalami masalah serupa. Di Indonesia, ada 31,3 juta orang tua, menurut Badan Pusat Statistik (2022). Sebagian besar dari mereka tidak tinggal

bersama anak-anaknya dan mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Dalam studi Simatupang et al. (2023), ditemukan bahwa orang tua yang tinggal sendiri atau dalam rumah tangga kecil cenderung lebih berisiko mengalami kesepian, penelantaran, dan keterasingan sosial. Hal ini menjadi sorotan penting seiring meningkatnya jumlah orang tua di Indonesia sebagai bagian dari fenomena transisi demografi.

Anak-anak adalah anggota keluarga yang rentan, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Studi Widyastuti (2020) di Kota Semarang menemukan bahwa balita yang berasal dari keluarga kurang mampu memiliki kemungkinan lebih besar mengalami stunting, terutama jika ibunya memiliki tingkat pendidikan rendah, penghasilan di bawah UMR, dan pola asuh yang tidak responsif. Anak-anak dalam situasi seperti ini sangat bergantung pada dukungan sistemik dari pemerintah dan masyarakat.

Kondisi keluarga yang rentan semakin memburuk selama pandemi COVID-19. PHK massal membuat banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan, yang berdampak pada kesehatan anak. Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) menemukan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin lebih rentan terhadap malnutrisi, tekanan psikososial, dan ketidakpastian rumah tangga. Pandemi menunjukkan seberapa cepat kerentanan keluarga dapat meningkat karena guncangan dari luar.

D. Gambaran Global tentang Keluarga Rentan

UNICEF dan WHO memperkirakan bahwa lebih dari 350 juta anak hidup dalam kondisi sangat rentan, yang mencakup

kemiskinan ekstrem, bencana alam, dan konflik bersenjata, selain menjadi masalah domestik. Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara adalah tempat di mana anak-anak paling banyak mengalami malnutrisi, tidak bersekolah, dan kehilangan perlindungan orang tua (UNICEF & WHO, 2022).

Dalam literatur internasional, istilah anak-anak yang tidak memiliki pengasuh utama karena konflik, kemiskinan, atau HIV/AIDS disebut sebagai *orphans and vulnerable children* (OVC). Menurut Murray et al. (2021), OVC sangat rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan gangguan kesehatan mental. Konsep ini digunakan untuk mendorong program perlindungan anak yang berbasis komunitas dan kerja sama multisektor.

E. Implikasi Kebijakan

Data sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab kerentanan keluarga saling berhubungan dan kompleks. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga internasional tidak dapat dianggap tidak proporsional. Kebijakan berbasis data yang responsif diperlukan untuk menggabungkan layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak ke dalam satu sistem. Di Indonesia, metode ini telah mulai diterapkan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi untuk menyentuh kelompok yang paling terdampak, penerapan masih membutuhkan penguatan lokal.

F. Dampak Kerentanan Terhadap Anak dan Pola Pengasuhan

Kerentanan anak juga merupakan kondisi multidimensi yang muncul akibat ketidakmampuan lingkungan keluarga dan sosial untuk memenuhi hak dasar anak secara utuh. Dua faktor utama ini untuk memperbesar kerentanan tersebut adalah kemiskinan dan lemahnya pola dalam pengasuhan. Ini juga menunjukkan bahwa rendahnya pendapat keluarga yang berkontribusi signifikan akan terhadap kejadian stunting untuk anak yang berusia 24-59 bulan. Banyaknya 76% balita yang mengalami stunting berasal dari keluarga yang berpenghasilan dibawah minim pendapatan yang rendah dan kejadian stunting (p=0, 004). Anak-anak yang dari keluarga miskin sering juga kekurangan terhadap akses pangan yang bergizi, pelayanan kesehatan yang memadai, serta juga pendidikan gizi yang benar. Selain itu juga daya beli yang rendah dapat menyebabkan keluarga cenderung membeli makanan dalam jumlah yang besar dengan kandungan karbohidrat yang tinggi namun juga rendah protein, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kegagalan tumbuh kembang pada anak. Stunting juga tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, serta dapat menurunkan produktivitas di masa depan yang dapat memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi.

Di sisi lain juga, kerentanan anak juga dapat muncul akibat lemahnya perlindungan psikososial dalam lingkungan keluarga. Banyak juga kasus kekerasan seksual terhadap anak yang belum terungkap karena korban tidak berani

berbicara dan kadang orang tua tidak peka terhadap perubahan tingkah laku anak. Kondisi ini juga dapat mencerminkan kegagalan pola asuh yang protektif dan responsif. Pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak pada jangka panjang panjang berupa trauma psikologis, gangguan emosi, ketidakpercayaan terhadap orang lain, gangguan prestasi akademik, bahkan risiko tinggi menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa mendatang.

Anak-anak usia dini kebanyakan menjadi korban pelecehan membutuhkan intervensi yang tepat dan menyeluruh dari pekerja sosial, pendampingan keluarga, serta edukasi masyarakat akan kasus serupa tidak akan terulang lagi. Di tengah lemahnya sistem pengawasan, anak-anak rata-rata menjadi sasaran empuk eksploitasi seksual, terutama di lingkungan yang miskin, padat, dan memiliki kontrol sosial yang rendah.

Dari kedua kondisi ini stunting akibat kemiskinan dan pelecehan seksual akibat pengabaian untuk mengindikasikan bahwa kerentanan anak tidak akan dapat dipisahkan dari sistem sosial dan struktur keluarga yang tempat mereka dibesarkan. Anak yang dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pengasuhan dan pengawasan yang layak akan sangat rentan mengalami kerentanan ganda seperti kekurangan gizi dan kekerasan seksual. Karena itu, upaya dalam perlindungan anak tidak cukup hanya melalui pendekatan medis atau hukum, tetapi harus melibatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, edukasi pengasuhan berbasis nilai, serta sistem perlindungan anak yang aktif dan berbasis komunitas. Negara, lembaga sosial, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh

kembang anak secara utuh baik secara fisik, psikologis maupun sosial untuk memutus mata rantai kerentanan dan memastikan terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan.



Gambar Ilustrasi Keluarga Rentan Mengalami Kekerasan pada Rumah Tangga



BAB 2

TEORI DAN KONSEP DASAR PENGASUHAN (KONSEPTUAL)

Nama Penulis

1. Aila Rakmadani
2. Dewi Azka Tazkiyah Aula
3. Dinda Anugrah Imelda Fathiroh
4. Rafif Dhini Hendika

A. Teori-Teori Pengasuhan

1. Teori Pola Asuh Baumrind

Baumrind membedakan pola asuh orang tua menjadi empat kategori utama, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam menuntut (*demandingness*) dan memberikan tanggapan (*responsiveness*) kepada anak.

Pertama adalah pola asuh authoritative, yaitu pola pengasuhan yang memadukan tuntutan dan tanggapan dalam kadar yang sama-sama tinggi. Orang tua dengan gaya ini bersikap hangat sekaligus tegas. Mereka menetapkan standar perilaku yang jelas, memastikan standar tersebut dapat dijalankan, dan memberikan harapan

yang konsisten sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anak. Pola ini memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan mengarahkan diri, namun tetap menuntut tanggung jawab terhadap perilaku yang ditunjukkan. Orang tua menghadapi anak secara rasional, berorientasi pada pemecahan masalah, mendorong diskusi dalam keluarga, dan menjelaskan alasan di balik disiplin yang mereka terapkan.

Kedua adalah pola asuh indulgent, yang ditandai dengan tuntutan rendah tetapi tanggapan tinggi. Orang tua dalam kategori ini sangat menerima anak apa adanya, namun cenderung pasif dalam hal kedisiplinan. Mereka jarang memberi tuntutan atau batasan perilaku, sehingga anak memiliki kebebasan bertindak hampir tanpa kontrol. Bahkan, sering kali orang tua dengan pola ini menempatkan diri sebagai pusat perhatian bagi anak tanpa mempertimbangkan apakah anak memang memerlukannya atau tidak.

Ketiga adalah pola asuh authoritarian, yang menunjukkan tingkat tuntutan tinggi namun tanggapan rendah. Orang tua dalam pola ini sangat menjunjung kepatuhan dan mengharapkan semua permintaan dipenuhi tanpa pertanyaan. Mereka lebih menyukai metode hukuman, bersifat absolut, dan menerapkan disiplin ketat. Aturan dan standar yang mereka tetapkan bersifat kaku, membatasi kebebasan anak, dan tidak memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi.

Keempat adalah pola asuh neglectful, yakni pola pengasuhan yang rendah dalam tuntutan maupun

tanggapan. Orang tua yang menerapkan gaya ini memberikan sedikit waktu dan energi untuk berinteraksi dengan anak, memenuhi kebutuhannya hanya sekadar cukup, dan sering kali tidak mengetahui aktivitas atau keberadaan anak. Mereka kurang berminat memahami pengalaman anak di sekolah maupun dalam hubungan sosialnya, jarang berkonflik atau berdiskusi dengan anak, serta cenderung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan opini anak. Dalam mengatur rumah tangga, fokus mereka lebih pada kepentingan dan minat pribadi ketimbang kebutuhan anak.

2. Teori Ekologi Bronfenbrenner

Dalam kerangka psikologi perkembangan, teori ekologi yang dikemukakan Bronfenbrenner memandang bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang berbeda sepanjang rentang usia, dan masing-masing lingkungan memberikan pengaruh terhadap perilaku serta perkembangan individu. Teori ini membagi pengaruh lingkungan ke dalam lima sistem yang saling berkaitan.

Mikrosistem merupakan lingkungan terdekat yang langsung dihadapi anak, seperti rumah, sekolah, kelompok teman sebaya, dan komunitas sekitar. Hubungan personal yang terjadi di dalam mikrosistem, baik dengan keluarga, teman sekelas, guru, maupun pengasuh, akan memengaruhi perkembangan anak. Cara orang-orang tersebut berinteraksi dengan anak akan membentuk perilaku dan kepribadiannya, dan sebaliknya, respons anak juga akan memengaruhi cara mereka diperlakukan.

Dalam konteks mikrosistem, contoh penerapan pola asuh dapat dilihat dari berbagai gaya pengasuhan:

a. Pola otoriter, di mana orang tua membatasi kebebasan anak dengan aturan dan hukuman tanpa memberi kesempatan untuk berpendapat, yang sering dikaitkan dengan kesulitan anak dalam bersosialisasi.
b. Pola otoritatif, yang tetap menetapkan batasan tetapi mendorong kemandirian, menyediakan ruang diskusi, dan menunjukkan kehangatan, sehingga anak lebih mampu berfungsi secara sosial.
c. Pola permisif indifferent, yaitu orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak, menyebabkan anak kurang terkendali dan inkompeten secara sosial.
d. Pola permisif *indulgent*, di mana orang tua memanjakan anak dengan sedikit batasan, yang membuat anak cenderung kurang mampu mengendalikan diri.

Mesosistem mencakup hubungan antara dua atau lebih mikrosistem, misalnya antara keluarga dan sekolah, atau antara pengalaman di rumah dan lingkungan keagamaan. Interaksi antar lingkungan ini dapat memperkuat atau menghambat perkembangan anak. Misalnya, anak yang kurang mendapat perhatian di rumah mungkin kesulitan membentuk hubungan positif dengan guru atau teman di sekolah. Dengan kata lain, apa yang terjadi di rumah dapat memengaruhi kemajuan anak di sekolah, dan sebaliknya.

Ekosistem adalah lingkungan sosial yang tidak melibatkan anak secara langsung, tetapi tetap memberikan dampak besar pada perkembangan anak. Contohnya adalah tempat kerja orang tua, peraturan sekolah, media

massa, dokter, dan keluarga besar. Perubahan di salah satu elemen ekosistem dapat memengaruhi pola interaksi dalam keluarga. Sebagai contoh, seorang ibu yang mendapat promosi dengan tuntutan perjalanan dinas lebih sering mungkin akan mengalami perubahan hubungan dengan suami dan anak.

Makrosistem adalah sistem paling luar yang mencakup ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, dan budaya. Semua aspek ini memengaruhi nilai, perilaku, dan keyakinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya yang dimaksud meliputi pola perilaku, sistem kepercayaan, serta produk budaya yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat.

Chronosystem berhubungan dengan dimensi waktu dalam kehidupan anak, yang mencakup perubahan maupun keberlanjutan kondisi dalam lingkungannya. Hal ini dapat berupa transisi keluarga seperti perceraian, pindah rumah, perubahan pekerjaan orang tua, atau perubahan sosial yang lebih luas seperti krisis ekonomi dan perang. Waktu di sini tidak hanya dipahami sebagai usia kronologis, tetapi juga sebagai konteks sosial yang berubah seiring perjalanan hidup.

3. Teori Kelekatan (*Attachment Theory*)

Bowlby dan Ainsworth membagi kelekatan menjadi dua kategori besar, yaitu *secure attachment* dan *insecure attachment*. Individu dengan *secure attachment* cenderung percaya diri, optimis, dan mampu membangun hubungan dekat yang sehat dengan orang lain. Sebaliknya, individu dengan *insecure attachment* cenderung

menarik diri, merasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional, memiliki emosi berlebihan, dan berusaha mengurangi ketergantungan pada orang lain.

Bartholomew mengembangkan konsep ini menjadi empat gaya kelekatan. Pertama, *secure attachment style,* di mana individu memiliki harga diri tinggi, kepercayaan interpersonal yang kuat, dan pandangan positif terhadap hubungan. Anak dengan kelekatan ini biasanya terhindar dari perilaku menyimpang atau kenakalan.

Kedua, *fearful-avoidant attachment style*, di mana individu memandang negatif diri sendiri dan orang lain, merasa tidak mampu, cemas, dan menghindari hubungan dekat. Anak dengan pola ini cenderung terlibat perilaku kenakalan.

Ketiga, *pre-occupied attachment style,* yang ditandai dengan pandangan negatif terhadap diri sendiri tetapi masih berharap diterima dan dicintai oleh orang lain. Mereka berusaha menjalin hubungan, namun diliputi rasa takut akan penolakan. Anak dengan pola ini biasanya memiliki kompetensi sosial yang rendah.

Keempat, *dismissing attachment style,* di mana individu memandang diri sendiri secara positif, merasa mandiri, namun cenderung menolak hubungan emosional yang tulus karena menganggap orang lain kurang baik dibanding dirinya. Kurangnya komunikasi dan rasa percaya sering kali membuat anak dengan pola ini menunjukkan perilaku agresif atau kenakalan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan kelekatan antara orang tua dan anak sejak masa bayi hingga kanak-kanak akan membentuk pola-pola

kelekatan yang memengaruhi perilaku anak di kemudian hari.

B. Pengasuhan dalam Perspektif Ekologi Sosial

Menurut Bronfenbrenner, pengasuhan ekologi adalah pendekatan pengasuhan anak yang memperhatikan berbagai sistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Pengasuhan ekologi memandang anak berkembang dalam lingkungan sosial yang kompleks dan saling mempengaruhi.

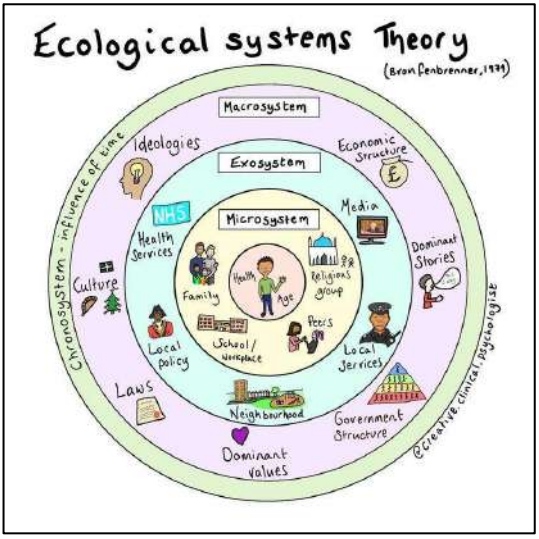

Gambar Diagram Sistem Ekologi

Lingkungan berdasarkan teori ekologi dibagi menjadi empat lapisan utama:

1. Mikrosistem, yaitu lingkungan terdekat yang dihadapi anak secara langsung, seperti rumah, sekolah, dan teman bermain.
2. Mesosistem, yaitu hubungan atau interaksi antar-lingkungan terdekat anak, misalnya hubungan antara

keluarga dengan sekolah, atau antara teman sebaya dengan lingkungan rumah.

3. Ekosistem, yaitu lingkungan yang tidak melibatkan anak secara langsung namun tetap berpengaruh terhadap kehidupannya, seperti tempat kerja orang tua atau kebijakan di lingkungan sekitar.
4. Makrosistem, yaitu kondisi sosial dan budaya yang lebih luas, seperti ideologi, nilai, tradisi, dan sistem kepercayaan yang berlaku di masyarakat tempat anak tinggal.

Selain itu, terdapat *chronosystem*, yaitu dimensi waktu yang memengaruhi perubahan dalam sistem lingkungan tersebut. Perubahan ini dapat bersifat jangka panjang, seperti perkembangan teknologi, atau perubahan mendadak, seperti peristiwa dalam keluarga, yang keduanya berdampak pada cara anak dibesarkan.

Pengasuhan, dalam perspektif ekologi, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan kehidupan anak. Konsep ini menempatkan pengasuhan dalam konteks budaya dan waktu. Artinya, pola asuh yang diterapkan orang tua sering kali dipengaruhi oleh harapan masyarakat terhadap anak di masa depan—misalnya keinginan agar anak kelak menjadi orang yang dihormati dan diakui oleh lingkungannya. Harapan ini umumnya bersumber dari nilai dan ideologi yang berlaku, sehingga memengaruhi cara orang tua mendampingi dan membimbing anak.

Mesosistem berperan penting dalam membentuk pola asuh. Jika hubungan antar-lingkungan terdekat anak, seperti keluarga dan sekolah, terjalin secara harmonis, maka orang tua akan lebih mudah menjalankan pengasuhan secara efektif. Di sisi lain, mikrosistem membentuk pola asuh melalui

interaksi langsung orang tua dan anak di lingkungan keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gaya pengasuhan orang tua berpengaruh besar terhadap perilaku, perkembangan potensi, serta kualitas kelekatan antara anak dan orang tua.

Sementara itu, *chronosystem* menjelaskan bahwa tren pengasuhan dapat berubah seiring waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat mobilitas orang tua semakin tinggi. Banyak ibu bekerja di luar rumah, bahkan ayah bekerja di luar kota dan harus meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kondisi ini mengurangi waktu kebersamaan keluarga, yang dapat menjadi ancaman bagi keharmonisan rumah tangga. Kurangnya interaksi ini berpotensi menimbulkan stres dalam pengasuhan dan menghambat terwujudnya lingkungan keluarga yang hangat dan suportif.

Dalam ilmu biologis, stress ialah adanya respon terhadap stimulasi yang tentunya dapat merugikan dan tidak menyenangkan terhadap orang yang mengalami stress tersebut. Dalam perspektif psikologi stress ialah suatu proses yang dijalani seseorang saat sedang berinteraksi dengan lingkungannya. stress pengasuhan dapat kita pahami sebagai stress atau situasi yang penuh dengan tekanan yang timbul pada pelaksanaan tugas pengasuhan anak. Pada dasarnya pengasuhan anak yang kita ketahui bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena proses pengasuhan itu sendiri penuh dengan tekanan. Faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya stress pengasuhan yaitu, dari individu, keluarga dan lingkungan. Stress pengasuhan yang dialami oleh individu bersumber dari pribadi orang tua maupun anak.

Kesehatan orang tua dapat dikatakan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya stress pengasuhan, misalnya sakit yang dialami orang tua dan berlangsung dalam jangka yang cukup lama. Masalah keuangan juga dapat mendorong timbulnya stress pengasuhan pada tingkatan keluarga. Tingkat penghasilan yang rendah dengan tuntutan kebutuhan yang tinggi dapat menimbulkan stress pengasuhan. Maka dari itu perlu bagi seorang ayah memiliki pekerjaan yang tetap dan seorang ibu hebat dalam mengurus keuangan rumah tangga.

Pengasuhan anak dikenal memiliki dampak terhadap dapat perkembangan individu. Dalam mengkaji mengenai dampak pengasuhan orang tua terhadap anak awalnya terdapat dua aliran yang dominan, yaitu psikoanalitik dan belajar sosial *(social learning).* Perkembangan secara kontemporer mengenai pengasuhan anak terdapat dua pendekatan yaitu: pendekatan tipologi atau gaya pengasuhan dan pendekatan interaksi sosial. pendekatan tipologi adalah bagaimana kita memahami ada beberapa dimensi dalam pelaksanaan tugas pengasuhan, yakni demandingness dan responsiveness. Bentuk bentuk perilaku pengasuhan orang tua, yakni:

- Mengontrol dan Memantau

  Orang tua perlu mengontrol anaknya, karena orang tua lah yang dapat membimbing dan mengawasi anaknya, itulah diperlukan pengontrolan dalam bentuk perilaku pengasuhan.

- Dukungan dan Keterlibatan

  Dukungan orang tua kepada anaknya sangatlah memberi pengaruh besar, dimana anak akan merasa dicintai dan dihargai terhadap keputusan yang ingin dilakukannya

melalui dukungan orang tua, apalagi jika orang tua ikut terlibat terhadap apa yang anak lakukan.

- Komunikasi

  Pentingnya komunikasi dalam pengasuhan orang tua, karena komunikasi secara umum dapat mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan dan kesejahteraan psikososial pada anak.

- Kedekatan

  Kedekatan antara anak dan orang tuanya merupakan aspek yang sangat penting dengan menghasilkan nilai nilai positif. Kedekatan antara orang tua dan anaknya keuntungan langsung. memberikan secara tidak.

- Kedisiplinan

  Disiplin dapat dijadikan suatu bentuk yang dapat dilakukan orang tua dalam mengontrol anaknya. Dengan kedisiplinan ini orang tua berharap anaknya dapat menguasai suatu kompetensi, dapat mengatur diri sendiri, dapat menaati aturan, dan dapat mengurangi perilaku-perilaku menyimpang dan berisiko.

C. Perbedaan Pengasuhan Normatif vs Pengasuhan dalam Konteks Kerentanan

Pengasuhan normatif adalah pendekatan pengasuhan yang mengikuti nilai-nilai, aturan, dan ekspektasi sosial yang dianggap secara umum atau ideal dalam suatu budaya atau masyarakat. Pengasuhan ini biasanya tidak melibatkan stress di dalam kehidupan awalnya, seperti trauma, kekerasan, penelantaran, atau perpisahan keluarga yang berkepanjang. Pengasuhan normatif ini bisa memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan otak anak usia dini. Dalam

praktiknya, pengasuhan ini mencerminkan nilai-nilai dominan seperti disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Gaya pengasuhan yang paling sering diasosiasikan dengan pendekatan normatif adalah **Gaya Otoritatif,** yaitu pola pengasuhan yang hangat tetapi juga tegas, responsif namun memiliki batasan yang jelas. Dalam pengasuhan ini sangat mendukung sekali dengan perkembangan anak secara optimal, karena memberikan rasa aman, memperkuat harga diri anak, dan juga mendorong keterampilan sosial serta akademik yang baik. Dalam banyaknya penelitian, pengasuhan normatif ini yang otoritatif bisa dikaitkan dengan hasil perkembangan anak yang positif di berbagai konteks budaya.

Pengasuhan normatif ini dapat berbeda tergantung dalam konteks budaya dan sosial. Sebuah praktik pengasuhan yang dianggap oleh normatif di satu budaya bisa saja tidak sesuai dengan budaya lainnya. Misalnya, di beberapa budaya Asia, pola pengasuhan ini lebih otoriter dianggap hal wajar dan bahkan dihargai juga, selama mendukung nilai-nilai keharmonisan dari keluarga dan respek terhadap otoritas. Oleh karena itu, efektivitas dalam pengasuhan normatif ini sangat bergantung pada kesesuaian antara nilai-nilai keluarga, masyarakat, dan juga persepsi anak terhadap praktik pengasuhan tersebut. Dalam penelitian lintas budaya bisa menekankan pentingnya memahami bahwa “normatif” bukanlah kategori universal, tetapi melainkan sangat kontekstual dan terkait erat dengan dinamika, sosial dan budaya dimana anak-anak ini dibesarkan.

Pengasuhan dalam konteks kerentanan ini lebih merujuk pada praktik pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua atau pengasuh dalam situasi yang berada di dalam kondisi rentan

secara fisik, emosional, sosial, atau psikologis. Dalam kerentanan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, disabilitas, trauma masa kecil, penyakit kronis, atau situasi krisis seperti bencana alam dan konflik keluarga. Dalam konteks ini, pengasuhan ini menuntut perhatian yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan khusus anak. Orangtua juga perlu memahami dinamika kerentanan anak dan menyesuaikan pola pengasuhannya agar mampu memberikan rasa aman, stabilitas emosional, serta dukungan yang memperkuat resiliensi anak dalam menghadapi tekanan atau risiko lingkungan sekitarnya.

Pengasuhan dalam konteks kerentanan juga mempunyai tantangan yang cukup besar. Banyak orangtua dalam situasi ini mengalami stres yang panjang, kurangnya dukungan sosial atau keterbatasan sumber daya, yang dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk memberikan pengasuhan yang optimal. Misalnya, stres dari orangtua ini akibat dari kemiskinan atau trauma pribadi dapat meningkatkan risiko yang munculnya dari gaya pengasuhan yang overprotektif, tidak konsisten, atau bahkan mengabaikan kebutuhan anak. Oleh karena itu, dalam pendekatan pengasuhan konteks kerentanan ini harus mencakup dukungan eksternal seperti layanan psikososial, pendidikan pengasuhan, dan juga intervensi berbasis komunitas agar orangtua juga mampu menjaga kesejahteraan diri mereka dan memberikan pengasuhan yang adaptif terhadap kebutuhan anak.

Berikut ini perbedaan pengasuhan normatif vs pengasuhan dalam konteks kerentanan:

Aspek	Pengasuhan Normatif	Pengasuhan dalam Konteks Kerentanan
Definisi	Praktik pengasuhan yang sesuai dengan norma sosial dan juga budaya umum.	Praktik pengasuhan yang dilakukan dalam situasi khusus yang penuh resiko atau juga tantangan.
Kondisi anak	Anak berada dalam kondisi perkembangan normal tanpa resiko yang signifikan	Anak memiliki kerentanan (fisik, emosional, sosial, atau psikologis).
Fokus Utama	Penanaman nilai umum, kemandirian, dan juga kontrol perilaku.	Perlindungan, stabilitas emosional, dan juga respons terhadap kebutuhan khusus.
Pendekatan Pengasuhan	Umumnya dalam mengacu pada gaya pengasuhan otoritatif, otoriter, dan permisif.	Lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi anak usia dini dan konteks lingkungan.
Tantangan Umum	Menyeimbangkan kontrol dan kebebasan anak.	Mengelola stres orang tua, keterbatasan sumber daya, dan juga adanya trauma.
Dampak pada Anak	Biasanya mendukung dalam perkembangan sosial dan juga akademik yang optimal.	Jika tidak dikelola dengan baik, bisa memperburuk kerentanan Jika positif, juga dapat membangun resiliensi.

Penjelasan singkatnya:

1. Pengasuhan Normatif, dalam pengasuhan ini berlaku dengan kondisi secara umum, didasarkan pada apa yang dianggap ideal oleh masyarakat dan juga menekankan disiplin serta kemandirian.
2. Pengasuhan dalam konteks kerentanan, pengasuhan ini memerlukan kepekaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan spesifik anak yang menghadapi kondisi kulit, seperti kemiskinan, trauma, atau disabilitas.

D. Konsep *Resilience* dan Peran Pengasuhan dalam Membentuk Ketahanan Anak

Reivich dan Shatte (2003) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan individu untuk bertahan dan beradaptasi secara positif dalam menghadapi segala bentuk tantangan, kesulitan, bahkan trauma, sehingga individu tersebut dapat bangkit kembali dengan cepat setelah mengalami krisis.

Menurut Fernandez dan Soedagijono (2018) resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, bertahan, dan pulih dari kesulitan atau tantangan dalam hidupnya, dengan menggunakan kekuatan internal dalam diri individu untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Peran orang tua sangat penting sebagai penggerak utama dalam membangun ketahanan pada anak. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang penuh tekanan, atau ketahanan, mulai terbentuk sejak usia dini dan tidak muncul secara tiba-tiba saat seseorang dewasa. Resiliensi adalah suatu proses yang dihasilkan dari kemampuan beradaptasi dengan pengalaman hidup yang sulit atau menantang, yang melibatkan

permulaan mental, emosional, dan perilaku, baik dalam penyesuaian eksternal maupun internal.

Ketahanan keluarga, atau yang dikenal sebagai kekuatan keluarga dan ketahanan keluarga, adalah konsep yang semakin berkembang, terutama di Indonesia. Keluarga berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang tangguh. Dengan demikian, anggota keluarga yang kuat akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sosial, budaya, politik, moral, dan agama, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi ketahanan keluarga untuk mendapatkan perhatian yang serius, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab terkait.

Keluarga merupakan sumber utama dan pertama dalam proses penanaman nilai dan norma, penanaman ini dilakukan lewat interaksi sosial antara anggota keluarga dan masyarakat. Menurut (Anisah Cahyaningtyas, Asih Amperiana Tenrisana, 2016) terdapat 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

1. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
2. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
3. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
4. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang.
5. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Mawarpury dan Mirza (2017) mengemukakan bahwa ketahanan keluarga (*family resilience*) memiliki pengertian kemampuan keluarga dalam hal toleransi terhadap ketidakpastian yang berlangsung lama dan kemampuan beradaptasi; kemampuan untuk bertahan dan bertumbuh ketika menghadapi kesengsaraan. Proses adaptasi ini bersifat positif karena disertai kemampuan untuk bangkit dari pengalaman buruk dan menyakitkan. Tingkat resiliensi setiap orang berbeda tergantung pada faktor faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Resiliensi juga bertumbuh dalam diri seseorang individu sejak anak-anak.

Menurut Lubis dan Dewi (2021), Resiliensi yang ditanamkan sejak usia dini akan membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup dengan tegar dan bersikap optimis saat menghadapi kesulitan.Resiliensi terbentuk dari tujuh aspek dalam diri seseorang, yaitu sebagai berikut:

- Pengaturan Emosi (*Emotion Regulation*)

  Pengaturan emosi adalah kemampuan seseorang untuk tetap tenang dan terkendali meskipun berada dalam situasi yang menekan. Sejauh mana kita dapat mengelola emosi, terutama emosi negatif, saat menghadapi kegagalan. Anak-anak usia dini yang mampu mengenali respons emosional dalam diri mereka akan lebih mudah melakukan pengaturan. Misalnya, mereka dapat mengungkapkan perasaan sedih ketika mainan mereka rusak atau merasa senang saat mendapatkan mainan baru. Dengan mengenali perasaan tersebut, anak secara tidak

langsung mengelola dirinya agar lingkungan dapat memahami dan memberikan respon yang sesuai.

- Pengendalian Diri (*Impuls Control*)

  Individu yang memiliki kemampuan pengendalian dorongan yang baik akan lebih mudah dalam mengatur emosi. Kemampuan untuk mengendalikan dorongan sangat penting untuk memastikan perilaku tetap dalam kendali diri dan tidak lepas kendali. Pada anak usia dini, kemampuan pengendalian dorongan seringkali berkaitan dengan kemampuan komunikasi mereka, seperti bagaimana mereka menyampaikan keinginan, bernegosiasi dengan orang tua saat ingin membeli sesuatu, belajar mengantri, berbagi, dan berbagai kegiatan sederhana lainnya. Jika kegiatan ini dikenalkan dengan baik, akan sangat membantu dalam membangun kemampuan pengendalian dorongan pada anak.

- Optimisme (*Optimis*)

  Optimisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik, memiliki harapan untuk masa depan, dan percaya bahwa kita dapat mengendalikan kehidupan sesuai keinginan kita. Sikap optimis pada anak usia dini sangat dipengaruhi oleh umpan balik atau apresiasi dari lingkungan serta pemahaman tentang pentingnya memiliki harapan dan tidak mudah menyerah. Misalnya, ketika anak gagal menyelesaikan suatu permainan, mereka mungkin merasa kecewa. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk memberikan dorongan agar anak tidak menyerah dan mencoba lagi, serta memberikan penghargaan saat anak berusaha. Dengan demikian, anak belajar untuk membangun hara-

pan dan optimisme bahwa usaha mereka akan menghasilkan hasil.Lebih lanjut, optimisme yang dimiliki orang tua dapat mempengaruhi pandangan dan perasaan mereka terhadap perilaku anak. Penelitian yang dilakukan oleh Kurtz–Nelson dan Mclntyre (2017) menunjukkan bahwa optimisme dapat memoderasi hubungan antara stres pengasuhan dan perasaan positif.

- Analisis Penyebab Masalah

  Analisis penyebab masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu peristiwa yang dialami. Kemampuan ini penting untuk menghindari tindakan salah yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Anak usia dini juga perlu distimulasi untuk mengenali sebab-akibat dan melakukan analisis secara sederhana. Hal ini tidak harus berkaitan dengan masalah yang kompleks, tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana. Misalnya, jika anak tanpa sengaja menginjak mainan hingga rusak, orang tua dapat mengajarkan konsep merapikan mainan setelah digunakan agar tidak berantakan dan terinjak. Dengan komunikasi yang tepat dan konsisten, pemahaman anak tentang analisis penyebab suatu masalah dapat terbentuk.

- *Reaching out* (Kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan)

  Individu yang mampu untuk memperbaiki dan mencapai keinginan yang dituju, maka akan memiliki aspek yang lebih positif. Apabila kita takut gagal sebelum mencoba, kita tidak akan mendapat apa yang kita inginkan. Anak usia dini yang memiliki pengalaman keberhasilan yang menyenangkan, cenderung akan tidak takut mencoba

dan akan lebih bersemangat untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan lainnya. Namun menciptakan pengalaman keberhasilan yang menyenangkan ini tidak akan begitu saja diperoleh tanpa ada dukungan dari orang tua atau lingkungan, dengan pemberian apresiasi dan *reward*

- Efikasi Diri (*Self-Efficacy*)

  Efikasi diri mencerminkan keyakinan individu bahwa mereka dapat memecahkan masalah dan mencapai keberhasilan. Keyakinan ini memotivasi kita untuk menghadapi tantangan dan percaya bahwa kita mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Kemampuan efikasi diri sangat penting sebagai bentuk optimisme terhadap tindakan yang diambil. Anak usia dini yang diberikan kebebasan dan kesempatan untuk mengeksplorasi diri dalam berbagai kegiatan cenderung memiliki efikasi diri yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang sering dilarang atau tidak diajak melakukan hal-hal baru. Pengalaman positif yang mereka bangun akan menjadi modal penting dalam membentuk rasa percaya diri dan keyakinan akan kemampuan mereka.

- Kemampuan untuk Meraih Keinginan (*Reaching Out*)

  Individu yang mampu memperbaiki dan mencapai keinginan mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif. Ketakutan akan kegagalan sebelum mencoba dapat menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Anak usia dini yang memiliki pengalaman sukses yang menyenangkan biasanya tidak takut untuk mencoba dan lebih termotivasi untuk mencapai keberhasilan lainnya. Namun, menciptakan pengalaman keber-

hasilan yang menyenangkan ini memerlukan dukungan dari orang tua atau lingkungan, termasuk memberikan penghargaan dan penghargaan.

Untuk membentuk resiliensi pada anak, orang tua perlu berempati dengan melihat dunia dari sudut pandang anak, berkomunikasi secara efektif dengan mendengarkan aktif, serta mengubah skenario negatif agar anak dapat beradaptasi dan mengubah perilakunya. dan adanya dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga berperan penting dalam membantu seseorang pulih dari situasi yang menimbulkan tekanan psikologis (Iganingrat & Eva, 2021). Dukungan sosial ini akan menciptakan perasaan terhubung dan aman yang mendorong individu untuk menghadapi masalah secara terbuka. Sebaliknya, individu dengan tingkat resiliensi yang rendah cenderung enggan berbagi pengalaman mereka dengan orang lain karena merasa tidak memiliki hubungan yang cukup erat dan cenderung merasa kurang nyaman atau malu untuk menceritakan pengalaman yang mereka lalui (Reivich & Shatte, 2003).

Oleh karena itu, ketahanan dan kesejahteraan keluarga haruslah berjalan beriringan. Jika keluarga sejahtera maka akan berpotensi besar pada peningkatan ketahanan keluarga. Keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang seimbang dan dapat mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsalain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.



Gambar Keluarga dalam Konsep *Resilience*

E. Rangkuman

Pengasuhan memegang peran penting dalam membentuk perkembangan dan ketahanan anak. Pengasuhan normatif didasarkan pada nilai sosial yang umum, dengan pola otoritatif sebagai pendekatan ideal. Namun, dalam konteks kerentanan seperti kemiskinan, trauma, atau disabilitas, pengasuhan perlu lebih adaptif dan didukung oleh lingkungan serta layanan yang responsif. Resiliensi anak dibentuk melalui pengasuhan yang positif dan suportif sejak dini. Tujuh aspek seperti pengaturan emosi, efikasi diri, dan optimisme menjadi kunci ketahanan anak. Dengan demikian, baik pengasuhan normatif maupun dalam konteks kerentanan berperan penting dalam membentuk anak yang tangguh. Ketahanan anak tidak dapat dilepaskan dari ketahanan keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga merupakan investasi penting untuk mewujudkan

generasi masa depan yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan.



BAB 3
PENGASUHAN DALAM KELUARGA MIGRAN

Nama Penulis

1. Nabila Mufida
2. Azzura Muthia Jasmine
3. Hilda Jeniarta Widodo

A. Konteks Migrasi: Internal (Desa-Kota), Internasional, Pekerja Migran

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu berusaha untuk memperoleh penghasilan dengan cara mencari pekerjaan. Ketika perekonomian suatu daerah masih rendah sedangkan pertumbuhan tenaga kerja terus meningkat, hal ini mengakibatkan kesempatan kerja menjadi tidak seimbang. Penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari pada permintaan tenaga kerja menyebabkan banyak tenaga kerja yang lebih memilih bermigrasi ke luar negeri. Migrasi adalah ketika seseorang berpindah tempat, namun tidak untuk tinggal menetap dan masih memiliki keluarga atau memiliki kaitan dengan kampung halaman atau yang

biasanya disebut migrasi sirkuler (Adioetomo & Samosir, 2010)

Pertumbuhan penduduk terjadi sebagai hasil dari keseimbangan antara faktor-faktor yang menambah dan yang mengurangi jumlah penduduk. Penambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran (fertilitas) dan migrasi masuk, sementara pengurangannya disebabkan oleh kematian (mortalitas) dan migrasi keluar. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Penduduk melakukan migrasi bisa disebabkan oleh faktor ekonomi misalnya keadaan ekonomi daerah asalnya tidak baik maka penduduk pindah ke daerah lain untuk mendapatkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Ketika penduduk tersebut bermigrasi maka ada akibat ekonomi juga yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan penelitian Hartman Sundjaya (2023) dalam Amaya.2024 bahwasanya migrasi dari kota ke desa merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan perbedaan pendapatan antara desa dan kota. Ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan dari migrasi selama jangka waktu tertentu di wilayah perkotaan. dan biaya migrasi dengan tingkat pendapatan pedesaan rata-rata.

Pendatang dengan sumber daya manusia yang rendah merupakan salah satu kelompok pelaku migrasi ke kota, yang menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial dan tindak kriminal, masalah pengangguran, dan kemiskinan (Hidayati, 2020). Hanya 14% migran risen di perkotaan memiliki gelar perguruan tinggi, sebagian besar memiliki pendidikan SMA ke

bawah, dan 19,1 persen tidak memiliki ijazah, menurut data Publikasi Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019) dalam Amaya, 2024. Migrasi internasional/international migration merupakan perpindahan penduduk dari suatu Negara ke Negara lain. Migrasi internasional Indonesia adalah perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain. Migran internasional dari Indonesia didominasi migran tenaga kerja temporer (pekerja kontrak). Mereka bertujuan untuk bekerja di negara lain tetapi tidak menetap di negara lain tersebut. Migrasi internasional dari Indonesia mempunyai faktor pendorong yang kuat yaitu pengangguran, upah rendah dan kemiskinan (Asis, 2004) dalam Dewi, 2019. Upah rendah dan kemiskinan merupakan faktor ekonomi secara umum.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan pekerja migran adalah seseorang yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah. Berdasarkan jenis pekerjaannya, pekerja migran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pekerja migran informal dan pekerja migran formal.

Faktor-faktor yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi 1) Faktor pendorong *(push factor)* Faktor/hal-hal yang menyebabkan penduduk ingin keluar dari wilayah tempat

tinggalnya/asal, misalnya tidak ada lagi atau berkurangnya lapangan pekerjaan di wilayah tempat tinggalnya, seperti makin sempitnya lahan pertanian dan pertanian mulai menggunakan mesin bukan tenaga manusia. 2). Faktor penarik (*pull fator*) Faktor/hal-hal yang menyebabkan penduduk ingin masuk ke wilayah baru/lain (tujuan) misalnya ada lapangan pekerjaan yang sesuai, kondisi lingkungan yang lebih baik, adanya kesempatan untuk lebih maju dibanding bila tetap berada di wilayah asal (Dewi, 2019).

B. Dampak Migrasi pada Peran Orang Tua dan Keterpisahan Fisik

Anak-anak yang ditinggal bermigrasi oleh orang tuanya merupakan kelompok yang rentan persoalan sosial. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 2-3 persen anak ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bermigrasi ke luar negeri (Bryant, 2005) dalam Purwatiningsih, 2016. Anak-anak yang ditinggal bermigrasi oleh orang tuanya sering kali mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak,yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap psikologis anak. Namun beberapa studi menjelaskan bahwa migrasi internasional dapat memiliki efek positif dan negatif pada anak-anak yang ditinggalkan di negara asal. Ada kemungkinan bahwa remitan akan mengurangi kesulitan pembiayaan dalam rumah tangga dan dapat mengakibatkan peningkatan pendidikan anak, kesehatan anak, dan penurunan nilai pekerja anak. Namun para peneliti juga mengakui bahwa migrasi dapat memiliki dampak negatif pada anak yang mungkin lebih besar daripada efek positif karena remitan (Antman, 2012). Kehidupan anak menjadi lebih berat jika ditinggal ibu pergi apalagi jika kedua orang tua mereka yang pergi. Jika ibu atau

kedua orang tua pergi, peran orang tua akan digantikan oleh keluarga luas. Sementara itu, jika ayah yang bermigrasi, ibu akan menjadi pengasuh dari anak-anak yang ditinggal bermigrasi. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa peran orang tua akan digantikan oleh nenek jika ibu atau kedua orang tua bermigrasi.

Peran orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan pada keluarga migran sering menimbulkan pro dan kontra. Fenomena migrasi sebagai pola perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk bekerja di satu sisi memberikan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun pada sisi lainnya, fenomena tersebut selalu beriringan dengan perilaku pengabaian anak dalam keluarga itu sendiri. Pembagian pola asuh antara ayah dan ibu saat melakukan migrasi akan memberikan dampak pada kondisi psikologis anak-anak yang ditinggalkan. Merujuk adanya permasalahan tersebut, peran pengasuhan ibu sangat penting terhadap kondisi psikologis anak yang ditinggalkan dalam keluarga migran.

Berkembangnya paham feminis dalam pola migrasi di dunia mulai abad ke-19 memiliki dampak pada pergeseran nilai-nilai budaya dan pola asuh ibu terhadap anak yang ditinggalkan dalam keluarga. Fenomena tersebut menghasilkan masalah baru yakni kondisi psikologis anak yang buruk dalam keluarga migran (Parrenas, 2005) dalam Prasetyo, 2024. Adanya kegiatan migrasi yang dilakukan oleh ibu juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap suami dan anak-anak mereka di kampung halaman (Parreñas, 2008). Sejalan dengan hal tersebut, fakta lain menguatkan bahwa seorang suami tetap tidak dapat mengambil kendali

pengasuhan yang sering dilakukan oleh istri mereka saat bermigrasi (Jayawardena, 2006). Meskipun kehadiran pengasuh lain seperti kakek, nenek atau saudara dekat lainnya sering dianggap sebagai solusi, tetapi pada kenyataannya masih menimbulkan dampak negatif pada perkembangan mental dan kondisi psikologis anak yang ditinggalkan dalam keluarga migran (Jia & Tian, 2010; Nanthamongkolchai, Munsawaengsub, & Nanthamongkolchai, 2011; Zhou, Murphy, & Tao, 2014). Oleh karena itu, para ibu tetap perlu mempertahankan perannya sebagai agen utama pendidikan dan pengasuhan dalam sebuah keluarga.

Seorang Ibu Tetap menjadi penanggung jawab utama perawatan dalam keluarga bagi anak-anak mereka (Olson&DeFrain, 2006). Ibu yang melakukan migrasi juga tidak dapat melakukan pengasuhan secara maksimal bagi anak-anak mereka di kampung halaman karena waktu kerja yang padat (Zhou dkk., 2014).Hal tersebut pula yang menimbulkan ancaman kerusakan kualitas pengasuhan yang akhirnya akan berdampak terhadap tekanan emosional dan gangguan kelekatan antara orangtua dan anak (Zhoudkk., 2014).Dampak buruk lainnya yang terjadi yakni hubungan yang kurang harmonis yang bahkan terjadi hingga proses reunifikasi atau pertemuan kembali antara anak dan orangtua di kampung halaman (Shi, Bai, Shen, Kenny, & Rozelle, 2016 dalam Prasetyo, 2024.

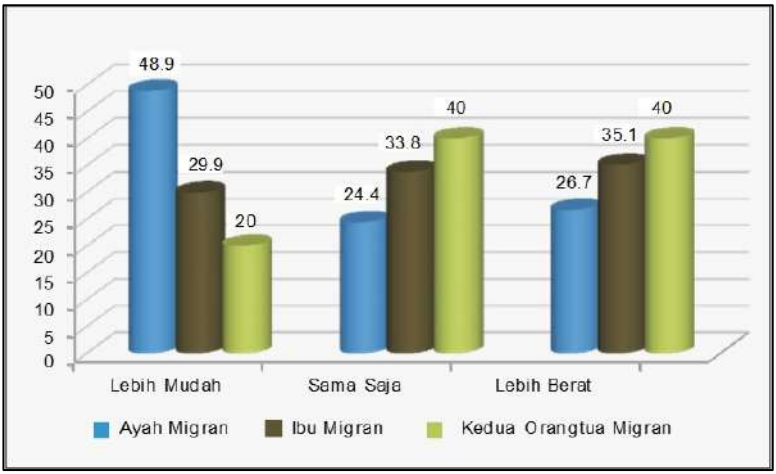

Gambar Diagram Anak setelah Orang Tua Bermigrasi

Kehidupan anak menjadi lebih berat jika ditinggal ibu pergi apalagi jika kedua orang tua mereka yang pergi. Jika ibu atau kedua orang tua pergi, peran orang tua akan digantikan oleh keluarga luas. Sementara itu, jika ayah yang bermigrasi, ibu akan menjadi pengasuh dari anak-anak yang ditinggal bermigrasi. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa peran orang tua akan digantikan oleh nenek jika ibu atau kedua orang tua bermigrasi. Data menunjukkan bahwa 60 persen rumah tangga migran dengan tipe kedua orang tua adalah migran memilih nenek dari pihak ibu menjadi pengasuh bagi anak yang ditinggal bermigrasi. Tidak lengkapnya Peran keluarga inti yang terdiri atas ayah dan ibu pada gilirannya akan membutuhkan peran dari keluarga luas. Peleburan keluarga inti ke dalam keluarga luas juga berdampak ter-hadap anak karena adanya perubahan pola pengasuhan anak (Wahyuni, 2000). Ketidakhadiran orang tua secara lengkap inilah yang kemungkinan membuat anak merasa berat.

C. Strategi Menjaga Kedekatan Emosional dalam Jarak

Dalam keluarga di mana ibu adalah pekerja, khususnya pekerja migran perempuan, tantangan utama muncul terkait terbatasnya waktu ibu untuk mengasuh dan membimbing anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memaksimalkan peran ayah dan melibatkan orang tua pengganti lainnya seperti pengasuh, kakek-nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga besar. Kolaborasi ini penting agar anak dapat belajar mandiri dan tumbuh kembang fisik serta psikologisnya tetap terjaga. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu:

- **Optimalisasi Peran Orang Tua yang Ada di Rumah atau Tidak Bekerja**

  Mengoptimalkan peran salah satu orang yang tidak bekerja agar saling melengkapi sehingga anak tidak merasakan kehilangan sosok dari kasih sayang orang tua. Contohnya ketika sang ibu bekerja dan ayah dirumah, maka mengoptimalkan peran ayah di rumah adalah kunci dari keberhasilan orang tua dalam mengasuh anak. Meskipun, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak pasti membutuhkan peran ibu yang sangat besar namun hal itu tidak menghalangi peran ayah untuk memaksimalkan interaksi pengasuhan pada sang anak. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak mengandung aspek waktu, interaksi, dan perhatian. Menurut Grant dari kutipan Budi Andayani dan Koentjoro (2004), menyebutkan bahwa pengertian dari pengasuhan anak yang seharusnya diperhatikan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan anak yang mengandung aspek sosial, fisik, spiritual, dan intelektual. Oleh karena itu, keterlibatan ayah pada

pengasuhan ini harus mencukupi di empat aspek tersebut.

- **Pelibatan Keluarga Besar di Antara Anggota Keluarga Besar**

  Keterlibatan keluarga besar seperti kakek, nenek, paman, ataupun bibi merupakan peranan yang penting ketika kedua orang tua pada anak memiliki waktu pekerjaan yang sama. Diantara kakek, nenek, bibi, dan paman yang menjadi pilihan terbaik adalah nenek untuk mengasuh anak. Karena pada dasarnya nenek adalah sumber kasih sayang yang dimana kehadirannya mengisyaratkan kasih sayang tiada tara dan kesabaran. Peranan nenek terkadang menimbulkan situasi yang tidak diinginkan hal itu dapat terjadi karena adanya perbedaan model pengasuhan yang diterapkan oleh kedua orang tua sang anak. Maka hal yang dapat dilakukan sebelum orang tua memutuskan untuk menitipkan anaknya kepada keluarga besar adalah berkolaborasi dan berkomunikasi secara aktif pada keluarga besar terkait dengan pola pengasuhan yang diinginkan oleh orang tua, memang tidak mudah untuk memaksimalkan pola asuh tersebut namun peranan orang tua untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap perkembangan anak yang dihasilkan dari pola asuh keluarga besar juga sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Meski orang tua sibuk dalam pekerjaan dan anak dititipkan kepada keluarga besar bukan berarti tugas daripada orang tua tersebut telah selesai bahkan disitulah tantangannya.

- **Pelibatan Pramuwisma sebagai Salah Satu Anggota Keluarga**

  Keterlibatan Pramuwisma akan turut serta dalam pengasuhan anak terlebih untuk orang tua perempuan pekerja kota. Tugas dari pramuwisma sendiri adalah untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah namun tidak sedikit pramuwisma yang berperan dalam pengasuhan anak meskipun tidak memiliki pengetahuan terkait pola asuh pada anak. Bahkan, terdapat pramuwisma yang belum pernah memiliki pengalaman atau keterampilan yang memadai dalam pengasuhan anak sehingga sepantasnya pada saat orang tua memutuskan untuk memberikan pengasuhan anak pada pramuwisma, berikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan memadai dalam pengasuhan sehingga anak dapat tetap berkembang dan diasuh dengan benar. Di samping itu tidak lepas dari pengawasan orang tua.

- **Peranan Lembaga atau Kelompok Pelayanan bagi Anak**

  Sistem pelayanan anak menurut Dubois dan Milley (1992) adalah kerangka penguat *(supportive)* yang mengarah pada penguatan kemampuan orang tua dalam meningkatkan hubungan dengan anak serta menunjang (*supplemental*) kebutuhan yang dibutuhkan ketika orang tua tidak dapat menjalankan perannya tetapi dapat menjalankan pengasuhan dalam keluarga atau pengganti (*subtitutive*) yang diarahkan untuk mengganti peranan keluarga dengan menempatkan anak diluar keluarga. Dalam hal ini tempat penitipan anak sebagai penunjang dapat menjadi alternatif ketika orang tua bekerja dan tidak bisa

memadai untuk mengasuh anak. Beberapa hal yang dapat diperhatikan orang tua saat akan menitipkan anak di tempat penitipan anak adalah melihat bagaimana fasilitas yang memadai, ketersediaan sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik, gizi, tempat istirahat yang nyaman dan lain sebagainya. Usahakan memilih lokasi yang terjangkau dari tempat kerja agar mempermudah akses dalam pengawasan dan penjemputan.

D. Pola Komunikasi dan Peran Teknologi

Komunikasi menjadi kebutuhan manusia yang paling fundamental dalam kehidupan sosial. Dengan komunikasi manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan manusia dapat menganalisis berbagai macam peristiwa sosial dan bahkan menemukan peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menghindar dari berbagai macam ancaman yang membahayakan dirinya. Dengan demikian komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara anak dan orang tua yang menjadi buruh migran. Melalui media sosial, aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp, dan platform video call seperti Zoom atau Skype, komunikasi yang dulunya terbatas oleh jarak dan waktu kini bisa dilakukan secara lebih fleksibel dan interaktif. Teknologi memungkinkan kehadiran virtual yang bisa memperkecil rasa rindu dan memperkuat ikatan emosional meskipun secara fisik terpisah.Namun demikian, akses terhadap teknologi

tidak merata. Anak-anak buruh migran yang tinggal di daerah pedesaan atau memiliki keterbatasan ekonomi mungkin tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Di sinilah peran pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan menjadi krusial dalam memastikan bahwa kelompok rentan ini tidak terpinggirkan dalam era digital.

Di samping manfaatnya, teknologi juga membawa tantangan. Pola komunikasi digital yang terlalu singkat dan fungsional bisa mengurangi kualitas komunikasi yang bersifat mendalam dan penuh empati. Dalam jangka panjang, anak-anak bisa tumbuh dengan pemahaman yang minim tentang figur orang tua, yang hanya hadir dalam bentuk suara atau gambar di layar. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan identitas, rasa percaya diri, dan kemampuan anak dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pola komunikasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis dan emosional. Pelatihan keterampilan komunikasi digital bagi orang tua TKI dan pendampingan psikososial bagi anak-anak menjadi langkah penting untuk memaksimalkan peran teknologi dalam menjaga keutuhan dan kesehatan relasi keluarga.

E. Studi Kasus: Anak-Anak Buruh Migran dan TKI

Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok, merupakan salah satu daerah pengirim terbesar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, terutama ke negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Arab Saudi. Banyak dari mereka yang pergi

meninggalkan anak-anaknya dalam jangka waktu lama demi mencari penghidupan yang lebih baik. Anak-anak tersebut, yang dikenal sebagai "anak-anak TKI," tinggal bersama kakek-nenek, saudara kandung, atau bahkan tetangga. Masalah Utama yang Dihadapi Anak-Anak TKI adalah sebagai berikut:

- **Figur Otoritas dan Emosional.** Banyak anak mengalami kekosongan peran orang tua secara emosional. Anak-anak sering kali tidak memiliki figur otoritatif yang bisa membimbing secara langsung, terutama dalam masa-masa krusial seperti masa remaja.
- **Keterbatasan Komunikasi.** Meskipun sebagian keluarga memiliki akses terhadap teknologi komunikasi, tidak semua mampu memanfaatkannya secara optimal. Beberapa orang tua TKI bahkan hanya menelepon sekali dalam sebulan karena keterbatasan waktu kerja atau biaya pulsa. Akibatnya, komunikasi antara anak dan orang tua menjadi sangat minim.
- **Masalah Psikososial dan Perilaku.** Penelitian oleh UNICEF Indonesia (2011) menunjukkan bahwa anak-anak TKI lebih rentan terhadap stres, gangguan emosi, dan perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja atau depresi karena perasaan kesepian dan tidak mendapat perhatian cukup.
- **Ketimpangan Akses Pendidikan.** Beberapa anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kurangnya pengawasan dan motivasi dari orang tua. Dalam beberapa kasus, uang kiriman dari orang tua lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif oleh wali daripada untuk pendidikan anak.



Gambar Ilustrasi Keluarga yang Ditinggal Menjadi TKI

F. Rangkuman

Peran orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan pada keluarga migran menimbulkan pro kontra. Fenomena migrasi sebagai pola perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk bekerja di satu sisi memberikan dampak positif bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun pada sisi lainnya, fenomena tersebut selalu beriringan dengan perilaku pengabaian anak dalam keluarga itu sendiri. Pembagian pola asuh antara ayah dan ibu saat melakukan migrasi akan memberikan dampak pada kondisi psikologis anak-anak yang ditinggalkan. Pengasuhan dalam keluarga migran menghadirkan tantangan tersendiri akibat keterpisahan fisik antara orang tua dan anak, baik karena migrasi internal maupun internasional. Meskipun begitu, dengan strategi yang tepat seperti menjaga komunikasi rutin, memanfaatkan teknologi secara positif, serta melibatkan pengasuh pengganti yang mendukung, kedekatan emosional antara orang tua dan anak tetap dapat terjaga. Peran aktif keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memastikan anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan optimal.



BAB 4
PENGASUHAN DALAM KELUARGA MARJINAL

Nama Penulis

1. Ni Made Ayu Saraswati Dewi
2. Fitriani Wardha Safina
3. Zahro Fildatu Rohmah
4. Aisyah Cindy Maulani

Bab ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam dinamika pengasuhan yang terjadi dalam keluarga marjinal, yaitu keluarga yang hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang terpinggirkan. Melalui pembahasan ini, pembaca diajak untuk memahami bagaimana keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial memengaruhi pola asuh anak-anak di lingkungan tersebut. Selain itu, bab ini juga menyoroti strategi bertahan hidup yang ditempuh keluarga miskin, serta dampaknya terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia dini. Disadari bahwa dalam konteks keterbatasan, pola asuh yang keras atau permisif kerap kali muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas hidup yang penuh tekanan. Bab ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi,

tetapi juga menawarkan pendekatan-pendekatan solutif, terutama melalui penguatan peran komunitas dalam mendukung pengasuhan anak. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat melihat secara utuh persoalan pengasuhan dalam keluarga marjinal sekaligus menemukan alternatif solusi yang berbasis komunitas dan kontekstual.

A. Pengertian Keluarga Marjinal (Tinggal di Wilayah Kumuh, Pekerjaan Informal, dll.)

Menurut KBBI, kaum marginal berarti berada di pinggir, tidak terlalu menguntungkan (KBBI Daring, 2021). Kaum marginal berasal dari bahasa Inggris marginalized people artinya jumlah atau efek yang kecil, artinya marginal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera (Setiadi, 2018).

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan bahwa kaum marginal adalah kelompok masyarakat miskin, gelandangan, pengemis, pemulung, buruh, pekerja anak, penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS, LGBT, pekerja seks komersial, korban perdagangan manusia, dan masyarakat adat (Puspa, 2020).

Selain itu, kelompok marginal juga dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami eksklusi sosial, yang dimana dalam kehidupannya tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.

Menurut Wahidin (2017), keluarga marjinal adalah keluarga miskin yang tidak terlalu menguntungkan dalam kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya keluarga margina mencari nafkah dengan bekerja sebagai

pemulung, kuli, pengamen, buruh, dan pengemis. Anak-anak dari keluarga marginal juga sering kali terpaksa atau dipaksa untuk bekerja dan mencari penghidupan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kaum marginal adalah kaum yang terasingkan dan tersisihkan dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat serta dalam memenuhi kebutuhannya harus menjadi pekerja informal seperti pemulung, pengamen buruh dan pengemis.



Gambar Keluarga Majinal dengan Kemiskinan

B. Akses Terbatas Terhadap Pendidikan, Layanan Kesehatan, dan Sosial

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki kondisi yang setara dalam mengakses hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Keluarga marjinal adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, sosial, geografis, atau kultural sehingga seringkali terpinggirkan dari sistem pelayanan yang seharusnya mereka nikmati. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan

sosial merupakan hak fundamental yang semestinya diperoleh setiap individu tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, keluarga marjinal kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti kemiskinan, lokasi tempat tinggal yang terpencil, keterbatasan fasilitas, dan diskriminasi sosial. Hambatan-hambatan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga menghambat tumbuh kembang optimal anak-anak dalam keluarga tersebut.Dalam sub bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai bentuk-bentuk keterbatasan akses yang dialami oleh keluarga marjinal dalam tiga aspek utama, yaitu; pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Dan akan diulas pula dampak dari keterbatasan tersebut serta berbagai upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses yang adil dan merata bagi semua keluarga, khususnya yang berada dalam kondisi termarjinalkan.

1. Akses Terbatas terhadap Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang sangat penting untuk masa depan mereka. Akan tetapi, bagi keluarga marjinal, akses terhadap pendidikan sering kali menjadi tantangan besar. Keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, tinggal di daerah terpencil, atau berasal dari kelompok sosial minoritas menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurut (Nurdin et al, 2024), meskipun pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, kenyataannya masih banyak anak-anak dari keluarga marjinal yang belum dapat menempuh jenjang pendidikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai

faktor, termasuk kesulitan ekonomi dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan. Banyak anak dari keluarga marjinal harus bekerja membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Biaya sekolah, meskipun secara formal telah dihapus melalui kebijakan pendidikan gratis, tetap menjadi beban karena masih adanya biaya tersembunyi seperti seragam, buku, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari.

Selain kemiskinan, faktor geografis juga menjadi kendala besar. Di daerah pedesaan atau pelosok, jarak sekolah yang jauh dan minimnya sarana transportasi membuat anak-anak enggan atau tidak mampu bersekolah secara teratur. Kualitas pendidikan di daerah tersebut juga sering kali lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan karena kekurangan guru, fasilitas yang tidak memadai, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Keluarga dari kelompok minoritas atau yang memiliki keterbatasan bahasa juga mengalami kesulitan dalam memahami sistem pendidikan, yang menyebabkan anak-anak mereka tertinggal atau bahkan dikeluarkan dari sistem pendidikan formal. Dalam beberapa kasus, diskriminasi dan stigma sosial juga turut memperparah kesenjangan akses pendidikan.

Sehingga dampak dari keterbatasan akses pendidikan ini sangat luas, mulai dari rendahnya tingkat literasi dan keterampilan, tingginya angka putus sekolah, sampai terbatasnya kesempatan kerja di masa depan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Maka

itu, perlu adanya intervensi yang holistik dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang keluarganya, memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.



Gambar Keterbatasan terhadap Pendidikan

2. Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Sayangnya, bagi keluarga marjinal mengakses layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan keselamatan anggota keluarga, khususnya anak-anak. Keterbatasan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kondisi geografis, budaya, dan sistem pelayanan yang belum sepenuhnya inklusif.

Faktor ekonomi menjadi penghambat utama. Meskipun pemerintah telah menyediakan program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kenyataannya masih banyak keluarga marjinal yang tidak terdaftar atau tidak memahami prosedur untuk mendapatkan layanan tersebut. Bahkan jika memiliki jaminan kesehatan, mereka tetap terbebani oleh biaya transportasi, obat-obatan

tambahan, atau waktu tunggu yang lama. Jarak dan lokasi juga memainkan peran penting. Banyak keluarga marjinal tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, atau daerah tertinggal yang jauh dari fasilitas kesehatan. Kondisi jalan yang buruk dan kurangnya transportasi umum membuat mereka enggan atau bahkan tidak mampu membawa anggota keluarga yang sakit ke puskesmas atau rumah sakit.

Kurangnya tenaga kesehatan yang memadai dan minimnya fasilitas medis di daerah marjinal turut memperburuk situasi. Misalnya, layanan kesehatan mental dan kesehatan ibu dan anak, sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia di beberapa daerah. Keluarga yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pola hidup sehat, imunisasi, dan perawatan dasar juga lebih rentan terhadap penyakit yang sebetulnya dapat dicegah. Beberapa kasus yang memperkuat keterpinggiran keluarga marjinal adalah stigma dan diskriminasi. Misalnya, keluarga yang tinggal di kawasan kumuh atau yang berasal dari kelompok etnis tertentu bisa saja mendapatkan perlakuan yang kurang adil atau tidak ramah dari petugas kesehatan.

Dampak dari terbatasnya akses layanan kesehatan ini sangat serius, mulai dari tingginya angka kematian ibu dan anak, gizi buruk, stunting, hingga meningkatnya penyakit yang tidak tertangani dengan baik. Maka dari itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan

masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan dan keterpinggiran.



Gambar Keterbatasan terhadap Kesehatan

3. Akses Terbatas terhadap Layanan Sosial

Layanan sosial merupakan bagian penting dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, disabilitas, dan masalah kesejahteraan anak. Sayangnya, keluarga marjinal seringkali mengalami hambatan dalam mengakses layanan-layanan ini, baik karena keterbatasan informasi, birokrasi yang rumit, maupun stigma sosial.

Salah satu kendala utama adalah minimnya informasi mengenai keberadaan dan prosedur akses terhadap layanan sosial. Banyak keluarga yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), layanan konseling, atau perlindungan anak. Ketidaktahuan ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi serta kurangnya pendampingan dari petugas sosial di lapangan. Birokrasi yang kompleks juga menjadi hambatan serius. Proses pengajuan bantuan atau perlindungan sosial seringkali membutuhkan dokumen

yang lengkap dan akses ke sistem digital, yang sulit dipenuhi oleh keluarga yang hidup dalam kondisi keterbatasan, terutama di wilayah tanpa akses internet atau yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Stigma sosial terhadap kemiskinan dan ketidakmampuan juga membuat sebagian keluarga enggan atau malu untuk mencari bantuan. Untuk beberapa kasus, layanan sosial justru belum memiliki pendekatan yang ramah dan empatik terhadap kondisi keluarga marjinal, sehingga memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah atau lembaga sosial. Keterbatasan akses ini juga berdampak luas pada keberlangsungan hidup keluarga, terutama anak-anak, lansia, dan individu dengan kebutuhan khusus. Ketika layanan sosial tidak dapat dijangkau, risiko kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, dan penelantaran menjadi lebih tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih proaktif, inklusif, dan berbasis komunitas dalam pemberian layanan sosial. Peran pekerja sosial, kader masyarakat, dan tokoh lokal sangat penting untuk menjangkau dan mendampingi keluarga marjinal agar mereka dapat mengakses hak-haknya secara layak.



Gambar Keterbatasan terhadap Layanan Sosial

Mengatasi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial pada keluarga marjinal memerlukan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lokal, serta dunia pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang inklusif dan berkeadilan. Upaya dan solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- **Peningkatan Akses Pendidikan**

  Dengan memberikan bantuan pendidikan yang komprehensif, tidak hanya gratis biaya sekolah, tetapi juga bantuan untuk perlengkapan belajar, transportasi, dan gizi siswa. Melakukan pembangun sekolah atau unit layanan pendidikan alternatif di daerah terpencil. Serta melibatkan guru-guru kreatif dan tenaga pendidik lokal melalui pelatihan dan insentif yang memadai. Mendorong program pendidikan non-formal dan pemberdayaan keluarga dalam mendukung pendidikan anak.

- **Peningkatan Layanan Kesehatan**

  Dengan cara memperluas jangkauan fasilitas kesehatan hingga ke daerah terpencil melalui puskesmas keliling atau layanan kesehatan berbasis komunitas. Menyediakan program edukasi kesehatan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Mempermudah pendaftaran dan penggunaan layanan JKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan agar ramah terhadap masyarakat miskin. Mengaktifkan kader kesehatan dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar.

- **Penguatan Layanan Sosial**

  Menyederhanakan proses administrasi untuk mendapatkan bantuan sosial dan layanan perlindungan. Meningkatkan kompetensi dan jumlah tenaga kesejahteraan sosial, terutama yang bekerja di lapangan. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendataan, advokasi, dan pengawasan distribusi bantuan. Menghilangkan stigma melalui kampanye sosial dan pelatihan petugas agar lebih empatik dan inklusif.

- **Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor**

  Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga itu sendiri untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marjinal. Prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Keluarga marjinal merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak dasar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Akses yang terbatas terhadap ketiga aspek ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan keterpinggiran antar generasi. Anak-anak dalam keluarga marjinal berisiko besar mengalami putus sekolah, gangguan kesehatan, dan keterbatasan perkembangan sosial-emosional jika sistem pelayanan publik tidak dirancang untuk merangkul mereka secara utuh. Permasalahan yang kompleks ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan dan

layanan yang inklusif, ramah terhadap keragaman, serta mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Intervensi yang bersifat holistik, berbasis komunitas, dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial yang sesungguhnya.

C. Strategi Bertahan Hidup dalam Kemiskinan dan Dampaknya pada Pengasuhan

1. Strategi Bertahan Hidup Keluarga Miskin

Keluarga miskin mengadopsi berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk:

a. Pola Konsumsi Minim: Mengurangi porsi makan, memilih makanan murah kurang bergizi, atau mengandalkan bantuan sosial.

b. Pekerjaan Ganda/Informal: Orang tua bekerja serabutan (buruh harian, pedagang kecil) tanpa jaminan pendapatan stabil.

c. Mengandalkan Jaringan Sosial: Meminjam uang/barang dari tetangga atau keluarga, atau mengandalkan sumbangan komunitas.

d. Eksploitasi Sumber Daya Terbatas: Memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam atau memelihara ternak skala kecil.

e. Penghematan Ekstrim: Menghindari biaya kesehatan (tidak periksa ke dokter) atau pendidikan (tidak beli perlengkapan sekolah).

2. Dampak pada Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini

Keterbatasan ekonomi memengaruhi pola pengasuhan dan pendidikan anak, terutama di usia dini (0–8 tahun), dengan dampak sebagai berikut:

a. Dampak pada Pengasuhan
   1) Keterbatasan Waktu Orang Tua. Orang tua sibuk bekerja sehingga kurang waktu untuk stimulasi anak, seperti bermain atau membaca bersama.
   2) Stres dan Pola Asuh Otoriter/Kurang Responsif. Tekanan ekonomi dapat membuat orang tua mudah marah, menggunakan hukuman fisik, atau kurang peka terhadap kebutuhan emosional anak.
   3) Kurangnya Akses ke Layanan Dasar. Imunisasi, posyandu, atau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sering terlewatkan karena biaya atau jarak.

b. Dampak pada Pendidikan
   1) Rendahnya Akses ke PAUD Berkualitas Anak dari keluarga miskin cenderung tidak terdaftar di PAUD/TK karena biaya, atau masuk ke lembaga dengan fasilitas terbatas.
   2) Keterlambatan Perkembangan Kognitif dan Sosial Kurangnya stimulasi di rumah (misal: tidak ada buku, mainan edukatif) dapat menghambat perkembangan bahasa, motorik, dan sosial-emosional anak.
   3) Risiko Putus Sekolah di Tahap Selanjutnya Dampak jangka panjang termasuk rendahnya

motivasi belajar dan risiko tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

3. Solusi yang Dapat Diterapkan

a. Program Bantuan Berbasis Pendidikan Subsidi atau beasiswa PAUD, penyediaan makanan bergizi (seperti program PMT), dan parenting education untuk orang tua.

b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pelatihan keterampilan dan akses modal usaha untuk meningkatkan pendapatan.

c. Layanan Kesehatan dan Pendidikan Terjangkau Posyandu gratis, klinik kesehatan, dan PAUD komunitas dengan biaya rendah.

d. Dukungan Sosial dan Psikologis Kelompok parenting support untuk mengurangi stres pengasuhan dan meningkatkan kesadaran pentingnya stimulasi dini.



Gambar Dampak Pengasuhan pada Anak Usia Dini

D. Pola Asuh yang Keras dan Permisif dalam Konteks Survival

Dalam keluarga marjinal, pola pengasuhan anak tidak hanya dibentuk oleh nilai-nilai budaya atau pengetahuan parenting, melainkan oleh tuntutan realitas sehari-hari untuk bertahan hidup (*survival mode*). Pola asuh keras (otoriter) sering ditandai dengan kedisiplinan tinggi, hukuman fisik/ psikologis, serta sedikit kompromi. Anak dituntut untuk patuh tanpa banyak penjelasan. Sedangkan pola asuh permisif berarti sebaliknya, orang tua cenderung longgar terhadap aturan, membiarkan anak bertindak sesuka hati, dan jarang memberi batasan atau disiplin. Dalam keluarga marjinal, kedua pola ini sering muncul secara bersamaan tergantung pada situasi dan tekanan ekonomi. Pola asuh keras muncul pada saat anak dianggap mengganggu kestabilan rumah tangga atau menambah beban (misalnya, membuat masalah di sekolah, berkelahi, boros, dll). Sedangkan pola asuh permisif muncul pada saat orang tua terlalu lelah, tidak punya energi emosional, atau merasa tidak berdaya untuk mengontrol anak, terutama ketika sibuk bekerja atau tidak memiliki waktu dan pengetahuan dalam mendidik anak. Contohnya Seorang ibu tunggal pekerja kasar mungkin memarahi atau memukul anak karena bolos sekolah (keras), namun membiarkan anak main seharian di luar tanpa pengawasan (permisif), karena tidak ada pilihan lain. Ada juga beberapa faktor penyebab hal ini terjadi, antara lain karena:

1. Kebutuhan ekonomi yang mendesak memaksa orang tua lebih fokus pada pekerjaan daripada pengasuhan emosional.
2. Kurangnya akses pendidikan parenting membuat mereka

mengulang pola pengasuhan yang dialami sebelumnya.

3. Ketidakstabilan emosi dan kelelahan mental mendorong reaksi spontan keras saat stres, permisif saat lelah.
4. Penggunaan anak sebagai tenaga bantu ekonomi juga membuat anak dituntut dewasa sebelum waktunya.



Gambar Pola Asuh Keras dalam Konteks Survival Mengakibatkan Anak-Anak Dituntut Menghasilkan atau Mencari Uang

Hal ini juga menyebabkan beberapa dampak negatif bagi anak. Ditemukan bahwa pola asuh permisif berdampak negatif pada kedisiplinan anak usia dini. Anak-anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan ini cenderung mengalami kesulitan mengikuti aturan, menunjukkan perilaku impulsif, dan kurang bertanggung jawab. Faktor utama yang mendorong orang tua menerapkan pola asuh permisif termasuk keinginan menghindari konflik, perasaan bersalah karena waktu yang terbatas dengan anak, dan kesalahpahaman tentang konsep kasih sayang (Darmawati & Ikrimah, 2022). Orang tua yang memberikan terlalu banyak kebebasan tanpa aturan membuat anak-anak melakukan apa yang mereka inginkan. Kurangnya hukuman membuat anak-anak mengulangi kesalahan yang sama, dan orang tua yang terlalu

memanjakan anak-anak mereka memberikan apa pun yang mereka inginkan selama mereka tidak rewel. Orang tua juga belum memahami cara yang benar untuk mengontrol emosi anak-anak mereka. Dampak dari pola asuh permisif ini menjadi hambatan bagi perilaku anak-anak, seperti menjadi impulsif, agresif, suka memberontak, kurang percaya diri, dan kurang pengendalian diri(Anggraini & Wijayaningsih, 2023). Menemukan bahwa pola asuh permisif berdampak pada perkembangan nilai agama dan moral anak yang kurang optimal dibandingkan dengan anak seusianya yang mendapatkan pola asuh lebih baik dari orang tuanya. Anak-anak yang mengalami pola asuh permisif cenderung belum mengenal agama yang dianut, belum membiasakan diri beribadah, belum memahami perilaku mulia, belum bisa membedakan perilaku baik dan buruk, serta belum bisa menghormati agama orang lain (Nurhayati, 2023). Menyimpulkan bahwa pola asuh permisif tidak selalu menghasilkan anak dengan kemandirian yang buruk, tetapi hal ini terjadi karena terdapat lebih banyak hambatan dibandingkan dengan pola asuh demokratis dan positif. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif cenderung tidak memiliki kesempatan untuk belajar mengendalikan diri mereka sendiri dan akan selalu mengharapkan serta bahkan memaksakan keinginan mereka (Nurli et al., 2023). Terdapat pengaruh pola asuh permisif terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan pola asuh permisif, maka akan semakin rendah perkembangan sosial emosional anak (Ramadanty et al., 2022) . Dan juga ada beberapa faktor yang lain:

- Kebingungan Emosional

  Anak tidak tahu kapan harus patuh atau bebas, sehingga bingung membentuk nilai dan perilaku.
- Kemandirian Palsu

  Anak tampak mandiri, tapi sering tumbuh dengan kecemasan tinggi dan kurang pengendalian diri.
- Rentan Perilaku Menyimpang

  Karena kurang kontrol dan bimbingan, anak bisa mencari "aturan" di luar (geng, kelompok teman negatif).

Beberapa upaya dan solusi yang dapat diterapkan dalam kejadian ini, yaitu:

1. Pendidikan *parenting* kontekstual yang murah dan mudah diakses.
2. Dukungan sosial berbasis komunitas, seperti posyandu, PAUD, atau kelompok ibu.
3. Program intervensi sosial dan ekonomi, agar keluarga tidak terus hidup dalam tekanan survival.

Pola asuh dalam keluarga marjinal tidak bisa dinilai semata-mata sebagai "salah" secara moral, melainkan perlu dilihat dari kacamata struktural dan kontekstual. Pola keras dan permisif menjadi bentuk adaptasi dalam menghadapi tekanan hidup. Untuk membangun pola pengasuhan yang sehat, diperlukan dukungan berlapis: edukasi, ekonomi, dan komunitas.

Hal ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang terjadi dari generasi ke generasi. Anak-anak dari keluarga marginal biasanya tumbuh tanpa dasar kesehatan dan pendidikan yang kokoh, yang akhirnya menyebabkan mereka kesulitan untuk bersaing secara sosial dan ekonomi ketika dewasa. Jika

tidak ada upaya dari pemerintah atau masyarakat untuk memberikan akses layanan dasar yang adil, ketimpangan sosial akan terus berlanjut dan semakin lebar.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk memberi prioritas pada pemerataan akses terhadap layanan dasar bagi semua anak, terutama yang berasal dari keluarga marginal. Langkah-langkah seperti penyediaan layanan kesehatan gratis, pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkualitas, perbaikan sanitasi lingkungan, serta program bantuan sosial yang terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Dengan demikian, setiap anak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dengan optimal.

E. Pendekatan Komunitas untuk Menguatkan Peran Pengasuhan

Pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) menjadi solusi efektif untuk memperkuat pengasuhan anak, terutama dalam konteks kemiskinan. Melibatkan masyarakat lokal, tokoh agama, kader posyandu, dan organisasi akar rumput dapat menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan.

1. Model Pendekatan Komunitas dalam Pengasuhan

a. Kelompok Pendukung Orang Tua (*Parenting Support Groups*)

Contoh Program**:** Bina Keluarga Balita (BKB). Program Kementerian PPPA RI yang melatih orang tua tentang stimulasi anak usia dini melalui kelompok komunitas.

Pos PAUD Terintegrasi Gabungan layanan PAUD dan *parenting education* di tingkat desa.

Manfaat:

1) Meningkatkan pengetahuan pengasuhan positif.
2) Memperkuat jejaring sosial antar orang tua.

b. Pendampingan oleh Kader/Komunitas Lokal

Peran Kader Posyandu & PKK:

1) Memberikan penyuluhan gizi, kesehatan, dan stimulasi perkembangan anak.
2) Mendeteksi dini masalah perkembangan anak (stunting, keterlambatan bicara). Contoh: Program "Kelas Orang Tua Hebat" (Kemdikbud) yang dijalankan oleh relawan komunitas.

c. Pendidikan Pengasuhan melalui Media Lokal

Strategi: Menggunakan media tradisional (radio komunitas, pertunjukan wayang, *podcast*) untuk sosialisasi pola asuh.

Contoh: Program "Ayo Melek PAUD" di NTT menggunakan radio untuk edukasi orang tua.

d. Kemitraan dengan Lembaga Keagamaan

Peran Majelis Taklim, Gereja, atau Pura:

1) Menyisipkan pesan pengasuhan dalam ceramah agama.
2) Membentuk "Keluarga Peduli Anak" berbasis nilai keagamaan.

2. Dampak Pendekatan Komunitas

a. Meningkatnya Kesadaran Orang Tua tentang pentingnya stimulasi dini.

b. Penguatan Jejaring Sosial antar-keluarga untuk saling mendukung.
c. Pengurangan Kesenjangan Akses layanan PAUD dan kesehatan.
d. Pencegahan Kekerasan dalam Pengasuhan melalui edukasi non-kekerasan.

Pola asuh dalam keluarga marjinal tidak bisa dinilai semata-mata sebagai "salah" secara moral, melainkan perlu dilihat dari kacamata struktural dan kontekstual. Pola keras dan permisif menjadi bentuk adaptasi dalam menghadapi tekanan hidup. Untuk membangun pola pengasuhan yang sehat, diperlukan dukungan berlapis: edukasi, ekonomi, dan komunitas.

Hal ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang terjadi dari generasi ke generasi. Anak-anak dari keluarga marginal biasanya tumbuh tanpa dasar kesehatan dan pendidikan yang kokoh, yang akhirnya menyebabkan mereka kesulitan untuk bersaing secara sosial dan ekonomi ketika dewasa. Jika tidak ada upaya dari pemerintah atau masyarakat untuk memberikan akses layanan dasar yang adil, ketimpangan sosial akan terus berlanjut dan semakin lebar.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk memberi prioritas pada pemerataan akses terhadap layanan dasar bagi semua anak, terutama yang berasal dari keluarga marginal. Langkah-langkah seperti penyediaan layanan kesehatan gratis, pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkualitas, perbaikan sanitasi lingkungan, serta program bantuan sosial yang terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Selain itu, dalam Pendekatan berbasis

komunitas (*community-based approach*) juga dapat menjadi solusi efektif untuk memperkuat pengasuhan anak, terutama dalam konteks kemiskinan. Melibatkan masyarakat lokal, tokoh agama, kader posyandu, dan organisasi akar rumput dapat menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap anak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dengan optimal.



Gambar Keluarga Marjinal dengan Kondisi Miskin



BAB 5
PENGASUHAN OLEH ORANGTUA TUNGGAL

Nama Kelompok

1. Rinda Aulia Febrianti
2. Alan Sukmawati
3. Adelia Mifta Oktafiyanti
4. Dewi Malik Anggraini

A. Tujuan Bab

Bab ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif dinamika pengasuhan yang dijalani oleh orang tua tunggal dalam berbagai kondisi sosial, emosional, dan ekonomi. Dengan memahami kompleksitas latar belakang mereka, pembaca dapat melihat bahwa pengasuhan oleh orang tua tunggal bukanlah satu bentuk yang seragam, melainkan beragam tergantung pada sebab dan konteks kehidupannya. Melalui bab ini, pembaca diajak untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak dalam keluarga yang hanya memiliki satu pengasuh utama. Fokus juga diberikan pada bagaimana sistem sosial, ekonomi, dan budaya berperan dalam mem-

bentuk pengalaman orang tua tunggal. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih empatik dan berbasis bukti sangat dibutuhkan untuk mendukung mereka.

Selanjutnya, bab ini juga mengeksplorasi tekanan emosional dan tantangan finansial yang dihadapi oleh orang tua tunggal, yang sering kali berdampak langsung pada gaya pengasuhan dan kondisi psikologis anak. Banyak dari mereka harus memikul beban peran ganda: sebagai pencari nafkah dan sekaligus pengasuh utama anak, tanpa adanya dukungan pasangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kesejahteraan orang tua sangat berkorelasi dengan kesejahteraan anak. Studi terbaru oleh Sia dan Aneesh (2024) menyebutkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal yang stabil secara emosional cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik dibandingkan anak dari keluarga dua orang tua yang disfungsional. Ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan dan pengasuhan lebih penting daripada jumlah pengasuh.

Bab ini juga ingin menggambarkan pentingnya jaringan dukungan sosial dan kebijakan publik dalam membantu orang tua tunggal menjalankan perannya secara optimal. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menyeimbangkan tuntutan ekonomi dan emosional sering kali bukan karena ketidakmampuan individu, melainkan karena minimnya akses pada fasilitas dukungan sosial seperti penitipan anak, waktu kerja yang fleksibel, dan layanan konseling. Menurut Franz et al. (2021), intervensi berbasis komunitas dan program kesejahteraan keluarga sangat berpengaruh dalam memperkuat kapasitas pengasuhan orang tua tunggal,

terutama ibu. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam isu ini sangat krusial.

Akhirnya, bab ini menghadirkan studi kasus dan cerita reflektif sebagai ilustrasi nyata yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan humanis. Kisah-kisah tersebut diangkat dari pengalaman individu yang hidup sebagai orang tua tunggal, dan menggambarkan bagaimana mereka mengatasi stigma, tantangan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan anak-anaknya. Selain memperkuat perspektif ilmiah dengan pendekatan naratif, bagian ini bertujuan menumbuhkan empati dan kesadaran sosial dalam kalangan pembaca. Bab ini akan menjadi relevan tidak hanya bagi kalangan akademik, tetapi juga untuk para pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan mendukung keluarga dengan satu orang tua. Karena itu, pendekatan multidisipliner sangat penting dalam mengurai persoalan ini.

B. Ragam Latar Belakang Orang Tua Tunggal



Gambar Kehangatan Hubungan Ibu Tunggal dan Anak sebagai Fondasi Utama Pengasuhan

Orang tua tunggal dapat berasal dari berbagai latar belakang yang mencerminkan keragaman pengalaman hidup,

mulai dari perceraian, kematian pasangan, hingga kehamilan di luar nikah. Setiap kondisi tersebut membentuk dinamika pengasuhan yang berbeda, baik dari sisi emosional, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, orang tua yang bercerai mungkin masih berhubungan dengan mantan pasangan untuk membahas pengasuhan, sementara mereka yang ditinggal mati harus menjalani peran sepenuhnya tanpa mitra. Kondisi kehamilan di luar nikah juga sering diiringi stigma sosial yang memperberat posisi orang tua, terutama jika mereka masih muda atau belum memiliki pekerjaan tetap. Seperti yang dikemukakan oleh Taylor et al. (2017), struktur keluarga bukan satu-satunya penentu hasil perkembangan anak; yang lebih penting adalah kualitas pengasuhan dan lingkungan sosial di sekitar anak.

Perceraian adalah penyebab paling umum dari status orang tua tunggal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perceraian sering kali menyisakan luka emosional baik bagi orang tua maupun anak, dan menimbulkan tantangan dalam penyesuaian pengasuhan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana konflik pasca-perceraian bisa mengganggu kestabilan emosional orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan. Menurut penelitian oleh Kim et al. (2022), perceraian yang diikuti konflik berkepanjangan lebih berdampak buruk bagi anak dibandingkan perceraian yang disikapi dengan kerja sama antara orang tua. Oleh karena itu, dukungan mediasi dan konseling setelah perceraian menjadi langkah penting untuk membantu proses transisi keluarga.

Selain itu, kematian pasangan sebagai penyebab orang tua tunggal juga menimbulkan tantangan emosional yang mendalam. Rasa duka yang berkepanjangan dapat meng-

ganggu kemampuan orang tua untuk menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Dalam banyak kasus, mereka juga harus segera kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan finansial, yang semakin memperbesar tekanan psikologis. Franz et al. (2021) menjelaskan bahwa duka yang tidak tertangani dapat menurunkan sensitivitas pengasuhan, dan berdampak negatif terhadap perkembangan emosional anak. Dukungan sosial dari keluarga, komunitas, atau layanan konseling sangat penting dalam tahap ini.

Kehamilan di luar nikah juga menjadi latar belakang yang tidak jarang menempatkan individu dalam posisi sebagai orang tua tunggal. Hal ini umumnya dihadapi oleh perempuan muda yang mengalami kehamilan tidak direncanakan dan tidak memiliki dukungan dari pasangan atau keluarga. Beban stigma sosial, penghakiman moral, dan minimnya akses pendidikan menjadi hambatan dalam menjalankan pengasuhan yang sehat. Penelitian oleh McIntyre et al. (2018) menunjukkan bahwa remaja yang menjadi orang tua tunggal memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis, terutama bila tidak mendapat dukungan yang memadai dari sistem sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, sangat penting untuk membangun pendekatan yang inklusif dan tidak menghakimi, agar mereka tetap dapat menjalankan fungsi pengasuhan secara positif.

C. Beban Ganda: Emosional dan Finansial

Menjadi orang tua tunggal berarti harus memainkan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh utama. Dalam kondisi ini, tekanan emosional sangat tinggi karena mereka harus mengambil keputusan penting tanpa

pasangan sebagai tempat berdiskusi. Tak jarang, mereka juga mengalami perasaan bersalah karena merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, baik secara material maupun afeksi. Kondisi ini membuat tingkat stres emosional meningkat, terutama ketika anak menunjukkan perilaku yang menuntut perhatian lebih. Menurut Kim & Lee (2021), beban emosional orang tua tunggal cenderung berlipat ganda ketika mereka merasa kesepian dan tidak memiliki dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar.



Gambar Seorang Ayah Tunggal yang Menjalani Peran Ganda dalam Keluarga

Selain beban emosional, tantangan finansial juga menjadi hal utama yang harus dihadapi. Karena hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, banyak orang tua tunggal harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Tidak jarang mereka mengambil lebih dari satu pekerjaan, yang pada akhirnya mengorbankan waktu kebersamaan dengan anak. Hal ini dapat memicu konflik internal yang berujung pada kelelahan mental dan fisik. Studi oleh Lee (2023) menunjukkan bahwa kondisi finansial yang tidak stabil mening-

katkan risiko depresi pada ibu tunggal, terutama yang tidak memiliki pendidikan tinggi.

Beban ganda ini juga memengaruhi pola interaksi dengan anak. Ketika orang tua merasa lelah secara fisik dan mental, kualitas pengasuhan bisa menurun tanpa disengaja. Interaksi menjadi lebih pendek, respons emosional terhadap anak pun bisa menjadi negatif karena kelelahan yang menumpuk. Akibatnya, anak mungkin merasa diabaikan atau justru menjadi lebih rewel karena mencari perhatian. Seperti dikemukakan dalam penelitian Taylor et al. (2017), kualitas pengasuhan orang tua tunggal sering kali dipengaruhi oleh kesejahteraan psikologis dan tekanan hidup yang mereka alami sehari-hari.

Namun demikian, tidak semua orang tua tunggal mengalami dampak negatif dari beban ganda ini. Banyak di antara mereka yang justru menunjukkan resiliensi tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sulit. Dengan dukungan sosial yang cukup dan akses pada bantuan finansial atau pelatihan kerja, banyak orang tua tunggal bisa bertahan dan tetap memberikan pengasuhan yang optimal. Strategi *coping* seperti mencari komunitas sejenis, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan membuka diri terhadap konseling juga terbukti membantu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beban ganda nyata, potensi keberhasilan pengasuhan tetap bisa dicapai (Sartor et al., 2023).

D. Isu Keseimbangan Kerja dan Pengasuhan

Orang tua tunggal kerap mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan anak-anak mereka. Kondisi ini semakin kompleks ketika jenis

pekerjaan yang mereka jalani memiliki jam kerja tidak tetap atau membutuhkan tenaga ekstra. Misalnya, banyak ibu tunggal bekerja sebagai buruh pabrik atau pegawai toko dengan shift malam, sehingga waktu bersama anak menjadi terbatas. Akibatnya, interaksi yang seharusnya menjadi momen penting dalam membangun kedekatan emosional menjadi terganggu. Kim et al. (2022) mencatat bahwa non-standard *working hours* menjadi salah satu faktor penghambat utama keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.

Keseimbangan kerja-pengasuhan yang buruk sering kali memicu konflik peran, yaitu ketika peran sebagai pekerja berbenturan dengan peran sebagai orang tua. Dalam banyak kasus, konflik ini menimbulkan rasa frustasi karena orang tua merasa gagal dalam dua sisi sekaligus: sebagai pekerja yang kurang produktif dan sebagai pengasuh yang tidak maksimal. Kondisi seperti ini berdampak buruk terhadap kesehatan mental, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap anak. Anak bisa merasa tidak diperhatikan, sementara orang tua merasa kewalahan. Menurut penelitian Conger & Widaman (2017), tekanan kerja yang tinggi sering kali menurunkan kualitas pengasuhan dalam keluarga tunggal.

Selain itu, kurangnya fleksibilitas dari tempat kerja memperburuk situasi orang tua tunggal. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan cuti orang tua, jam kerja yang fleksibel, atau akses ke fasilitas penitipan anak yang terjangkau. Padahal, dukungan semacam ini sangat penting agar orang tua dapat memenuhi tanggung jawab profesional dan keluarga secara seimbang. Tanpa dukungan dari sistem kerja yang inklusif, orang tua tunggal terjebak dalam situasi yang menguras tenaga dan emosi secara terus-menerus. Studi

oleh Taylor et al. (2017) menegaskan bahwa dukungan kebijakan kerja yang ramah keluarga dapat menurunkan tingkat stres orang tua tunggal secara signifikan.

Meskipun begitu, beberapa inisiatif komunitas dan pemerintah mulai memberikan perhatian pada isu ini. Misalnya, program pelatihan kerja fleksibel atau penyediaan daycare gratis mulai dikembangkan di beberapa wilayah sebagai respons terhadap kebutuhan orang tua tunggal. Kehadiran sistem pendukung seperti ini sangat membantu dalam mengurangi beban kerja dan memberi ruang bagi orang tua untuk lebih hadir secara emosional bagi anak. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan publik dan dukungan sosial menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan. Dengan demikian, meskipun tantangannya besar, jalan untuk menjalani peran ganda ini tetap memungkinkan dengan bantuan yang tepat (Lee, 2023).

E. Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Psikologis

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor kunci yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis orang tua tunggal. Dalam kondisi di mana beban pengasuhan ditanggung sendiri, kehadiran orang-orang terdekat yang memberikan dukungan emosional maupun praktis sangat membantu dalam meringankan tekanan sehari-hari. Dukungan ini bisa berasal dari keluarga, teman dekat, komunitas lokal, maupun lembaga keagamaan atau sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres orang tua tunggal cenderung lebih rendah ketika mereka merasa didukung oleh lingkungan sekitarnya (Taylor et al., 2017). Hal ini menandakan bahwa interaksi sosial yang sehat dapat berperan

sebagai pelindung dari gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan.

Sebaliknya, minimnya dukungan sosial justru dapat memperburuk kondisi mental orang tua tunggal. Mereka yang merasa terisolasi sering kali mengalami kelelahan emosional yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hubungan mereka dengan anak. Kondisi ini diperparah jika tidak ada akses terhadap layanan kesehatan mental atau komunitas pendukung. Dalam studi oleh Lee (2023), ditemukan bahwa ibu tunggal yang tidak memiliki dukungan sosial memadai menunjukkan tingkat kesehatan mental yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki jaringan sosial aktif. Maka dari itu, membangun lingkungan yang suportif bukan hanya penting bagi anak, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi orang tua tunggal itu sendiri.

Selain dukungan informal, kehadiran dukungan formal dari institusi juga memegang peran penting. Program pemerintah, seperti bantuan tunai, subsidi pendidikan, dan layanan penitipan anak, terbukti dapat mengurangi beban ekonomi dan psikologis orang tua tunggal. Di beberapa negara maju, pendekatan kebijakan yang berpihak kepada keluarga tunggal telah menunjukkan hasil positif terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Namun, di negara-negara berkembang, keterbatasan akses terhadap layanan tersebut masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memperkuat sistem dukungan jangka panjang yang berkelanjutan (Sia & Aneesh, 2024). Yang tidak kalah penting adalah keberadaan kelompok

pendukung *(support group)* berbasis komunitas atau daring. Kelompok ini memungkinkan orang tua tunggal saling berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi pengasuhan yang efektif. Dalam situasi di mana keluarga besar tidak tersedia atau kurang mendukung, komunitas seperti ini bisa menjadi ruang yang sangat berarti. Studi terbaru bahkan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam kelompok pendukung dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam pengasuhan dan mengurangi perasaan kesepian (McIntyre et al., 2018). Dengan demikian, dukungan sosial dalam berbagai bentuk harus terus dikembangkan sebagai pilar utama penguatan keluarga tunggal.

F. Studi Kasus dan Cerita Reflektif

Dalam memahami dinamika pengasuhan oleh orang tua tunggal, penting bagi kita tidak hanya melihatnya dari sudut pandang teori, tetapi juga dari pengalaman konkret yang dialami individu dalam kehidupan nyata. Kisah-kisah ini memberikan perspektif yang lebih manusiawi dan emosional mengenai perjuangan, ketahanan, serta ketulusan dalam menjalani peran sebagai ayah atau ibu tunggal. Mereka tidak hanya menghadapi beban ekonomi dan emosional, tetapi juga harus berhadapan dengan stigma sosial yang kerap menyudutkan posisi mereka di masyarakat. Melalui studi kasus nyata, kita dapat menangkap esensi dari pengorbanan dan kekuatan yang dimiliki oleh orang tua tunggal dalam membesarkan anak-anak mereka di tengah keterbatasan yang ada. Berikut dua kisah reflektif yang mencerminkan realitas tersebut.

1. Kisah 1: Dora Herta Lisna – PRT dan Ibu Tunggal Penuh Keteguhan



Gambar Perjuangan Seorang Ibu dalam Membesarkan Kedua Anaknya

Dora Herta Lisna adalah seorang ibu tunggal yang tinggal di Bekasi bersama dua anak perempuannya. Setelah suaminya berselingkuh dan pergi meninggalkan keluarga tanpa tanggung jawab, Dora mengambil peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pendamping anak-anaknya. Ia bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), profesi yang kerap dianggap rendah oleh masyarakat, namun justru menjadi sumber penghidupan utama bagi keluarganya. Dengan penghasilan yang terbatas, Dora tetap mampu membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Kisah Dora menunjukkan bahwa status pekerjaan tidak menghalangi seseorang untuk tetap bermartabat dan menjalankan peran sebagai orang tua dengan penuh cinta dan tanggung jawab (Konde.co, 2021). Lebih dari sekadar bertahan secara finansial, Dora juga harus menjalani pergulatan emosional dalam membesarkan anak-anak tanpa kehadiran sosok ayah. Ia berusaha hadir dalam setiap fase tumbuh kembang anak-anaknya,

memberikan kasih sayang sekaligus kedisiplinan, meskipun harus menahan lelah selepas bekerja. Tekanan hidup tidak membuatnya menyerah, bahkan ia mengaku semakin kuat karena dorongan dari kedua anak perempuannya. Ia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki masa depan. Keteguhan Dora menjadi cermin dari banyak ibu tunggal lain di Indonesia yang tetap tangguh di tengah keterbatasan.

2. Kisah 2: Wayne Toh – Ayah Tunggal Empat Anak yang Menginspirasi



Gambar Perjuangan Seorang Ayah dalam Membesarkan Anak-Anaknya

Wayne Toh, seorang pria asal Singapura, mengalami titik balik hidup ketika istrinya memutuskan untuk meninggalkan keluarga, menyisakan dirinya seorang diri untuk membesarkan empat anak. Pada awalnya, ia mengalami tekanan mental yang luar biasa, merasa tidak siap menjalani peran ganda sebagai ayah dan ibu sekaligus. Namun dengan tekad kuat dan kasih sayang mendalam terhadap anak-anaknya, Wayne perlahan beradaptasi dan mulai mengatur ulang kehidupannya. Ia belajar memasak, mengurus rumah, dan terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak, bahkan ketika harus membagi

waktu dengan pekerjaan utamanya. Kisah Wayne menjadi bukti bahwa pengasuhan bukanlah tanggung jawab berdasarkan gender, tetapi tanggung jawab cinta dan komitmen terhadap keluarga (The Asian Parent Indonesia, 2020). Dalam wawancaranya, Wayne menekankan pentingnya komunitas dan lingkungan yang suportif bagi orang tua tunggal. Ia sempat merasa malu dan tidak percaya diri karena menjadi ayah tunggal, sesuatu yang masih dianggap tabu di banyak budaya Asia. Namun, dengan bergabung dalam forum-forum online dan komunitas orang tua tunggal, ia mendapat dukungan emosional dan informasi yang sangat membantu dalam menjalankan pengasuhan. Wayne kini sering diundang menjadi pembicara dalam seminar *parenting* untuk berbagi pengalamannya, dan ia mendorong agar masyarakat tidak menghakimi status keluarga seseorang, tetapi melihat perjuangan dan cinta yang nyata di dalamnya. Pengalamannya membuktikan bahwa seorang ayah pun bisa menjadi pengasuh utama yang hangat dan mampu membangun fondasi keluarga yang sehat.

Kedua kisah tersebut memberi pelajaran penting bahwa pengasuhan oleh orang tua tunggal bukanlah suatu bentuk kekurangan, tetapi bentuk lain dari kekuatan keluarga yang adaptif. Mereka yang menjalaninya harus menghadapi tekanan dari berbagai sisi, baik ekonomi, emosional, maupun sosial. Namun keteguhan hati, ketulusan niat, dan komitmen terhadap anak-anak menjadi fondasi utama dalam proses pengasuhan mereka. Dukungan sosial dan keberpihakan dari masyarakat menjadi hal penting untuk menciptakan

lingkungan yang inklusif bagi mereka yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal. Dengan membuka ruang diskusi dan empati terhadap realitas ini, kita bisa menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih ramah dan mendukung terhadap keberagaman struktur keluarga.

G. Rangkuman dan Refleksi

Pengasuhan oleh orang tua tunggal adalah pengalaman yang kompleks, penuh tantangan namun juga penuh kekuatan. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjadi sumber nafkah, tetapi juga menjadi pilar emosional utama bagi anak-anaknya. Meskipun banyak rintangan yang dihadapi, seperti keterbatasan waktu, tekanan ekonomi, dan stigma sosial, banyak orang tua tunggal yang tetap mampu membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih dan ketekunan. Ini membuktikan bahwa bentuk keluarga tidak selalu menentukan keberhasilan pengasuhan. Yang terpenting adalah kualitas relasi dan komitmen dalam peran sebagai orang tua.

Dukungan sosial, baik informal maupun formal, terbukti sangat memengaruhi kesejahteraan psikologis orang tua tunggal. Hubungan interpersonal yang sehat dapat menjadi benteng dalam menghadapi tekanan hidup, sekaligus meningkatkan kemampuan pengasuhan. Selain itu, peran institusi negara dan komunitas lokal menjadi penting dalam menyediakan layanan dan perlindungan sosial yang relevan. Tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga edukasi dan pelatihan yang memperkuat kapasitas pengasuhan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga tunggal.

Melalui pendekatan yang empatik dan menyeluruh, masyarakat dapat menjadi ruang yang lebih ramah bagi keluarga tunggal. Penting untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa menjadi orang tua tunggal bukanlah suatu kegagalan, tetapi bagian dari realitas sosial yang patut dihargai. Narasi positif tentang perjuangan dan keberhasilan orang tua tunggal perlu diangkat untuk menghapus stigma yang masih melekat. Dalam jangka panjang, perubahan cara pandang ini akan berdampak pada kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, kita semua memiliki peran dalam menciptakan ekosistem pengasuhan yang sehat dan suportif.

Akhirnya, refleksi ini mengingatkan kita bahwa setiap keluarga memiliki dinamika dan kebutuhan yang unik. Oleh sebab itu, pendekatan satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*) tidak dapat diterapkan dalam kebijakan maupun program sosial. Pengasuhan oleh orang tua tunggal perlu dipahami secara kontekstual, dengan mendengarkan langsung pengalaman mereka dan mengintegrasikannya dalam proses penyusunan kebijakan. Ketika mereka diberi ruang, dukungan, dan pengakuan, orang tua tunggal akan mampu menjadi figur yang kuat dan inspiratif bagi generasi berikutnya. Karena pada akhirnya, keluarga yang sehat adalah fondasi masyarakat yang kuat.



BAB 6

PENGASUHAN DALAM KELUARGA PENYINTAS KEKERASAN

Nama Penulis

1. Amanda Nurul Humaidah
2. Riyadh Nauval Athala
3. Zefanya Ayunda Hemadafiyanti Putri
4. Nurul Azmiza Bin Asis

A. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pola Asuh

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak sistemik terhadap seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Ketika seorang individu, baik ibu maupun ayah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pola pengasuhan terhadap anak sangat berpotensi berubah menjadi tidak stabil, tidak responsif, dan kadang berulang dalam bentuk siklus kekerasan yang baru. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan psikologis orang tua sebagai pengasuh utama, tetapi juga membentuk lingkungan pengasuhan yang penuh tekanan dan minim rasa aman bagi anak.

KDRT merupakan fenomena yang tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis bagi korban langsung, tetapi juga membawa dampak jangka panjang terhadap sistem dan praktik pengasuhan dalam keluarga. Ketika salah satu atau kedua orang tua menjadi penyintas kekerasan, maka pola pengasuhan anak cenderung mengalami perubahan signifikan, baik dalam hal pendekatan emosional, komunikasi, maupun gaya disiplin. Menurut Astuti dan Murdiati (2020), KDRT tidak hanya melukai korban secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang penuh ketegangan, rasa tidak aman, dan kekacauan emosional. Dalam konteks ini, orang tua penyintas kekerasan seringkali mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau PTSD (*post-traumatic stress disorder*) yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.

1. Disfungsi Emosional Orang Tua dan Pengaruhnya terhadap Pola Asuh

Ketidakstabilan emosi pada pengasuh menjadi salah satu indikator utama yang dapat menyebabkan pola asuh yang tidak konsisten atau bahkan cenderung permisif dan abai. Penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT mengalami berbagai gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga rasa rendah diri yang mendalam (Suwanti & Purwanti, 2020). Keadaan psikologis ini membuat orang tua penyintas KDRT sulit menjalankan pola pengasuhan yang hangat, konsisten, dan suportif. Mereka cenderung bersikap ambivalen—kadang terlalu permisif karena

merasa bersalah, di sisi lain bisa juga terlalu otoriter karena emosi yang tak tersalurkan dengan sehat.

Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Maharani dan Fajrianthi (2019), ibu yang menjadi korban KDRT menunjukkan kecenderungan untuk mengalami kelelahan emosional dalam menjalankan peran sebagai pengasuh. Kelelahan ini menyebabkan ketidaksabaran dalam menghadapi perilaku anak, yang pada akhirnya mendorong praktik pengasuhan yang keras atau pengabaian terhadap kebutuhan emosional anak. Hal ini diperparah oleh tekanan ekonomi dan sosial yang menyertai pengalaman kekerasan. Dalam banyak kasus, anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan riwayat KDRT mengalami kebingungan terhadap figur otoritas dan sering kali menginternalisasi pola kekerasan sebagai bagian dari dinamika hubungan yang wajar.

"Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua penyintas kekerasan berisiko mengalami keterbatasan dalam pengembangan empati dan regulasi emosi, karena kurangnya model pengasuhan yang sehat." (Sari & Prasetyo, 2021, hlm. 77).

2. *Intergenerational Transmission of Violence*

Salah satu isu penting dalam keluarga penyintas KDRT adalah adanya *intergenerational transmission of violence*, yakni kecenderungan pola kekerasan yang berulang antar generasi. Anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga penuh kekerasan cenderung meniru gaya pengasuhan yang serupa di masa depan, baik sebagai korban maupun pelaku (Hadi & Putri, 2021). Hal ini diperkuat oleh penelitian Sulistyani dan Nugraheni

(2023) yang menunjukkan bahwa remaja yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga memiliki kemungkinan dua kali lipat untuk menggunakan kekerasan dalam interaksi interpersonal mereka.

Dalam tinjauan sistematis oleh Wahyuni (2022), anak yang tumbuh dalam keluarga penyintas kekerasan menunjukkan kecenderungan mengalami gangguan relasi interpersonal, termasuk kesulitan membentuk empati dan regulasi emosi. Ketiadaan model pengasuhan yang sehat, komunikasi yang tertutup, serta minimnya afirmasi kasih sayang di masa anak-anak membuat mereka gagal menginternalisasi prinsip empati, dialog, dan resolusi konflik secara damai. Dalam konteks ini, kekerasan bukan hanya menghancurkan satu generasi, tapi menjadi mata rantai yang berpotensi diwariskan, kecuali ada intervensi yang tepat dan dukungan sosial yang memadai.

3. Pola Pengasuhan Negatif: Permisif dan Autoriter

Pola pengasuhan yang diterapkan oleh penyintas kekerasan dapat mengambil berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang umum adalah pola asuh otoriter sebagai respons terhadap perasaan kehilangan kontrol yang dialami penyintas. Sebaliknya, beberapa penyintas cenderung menerapkan pola asuh permisif karena merasa bersalah atau takut kehilangan kasih sayang anak.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hapsari dan Suryanto (2019), pergeseran dari pola asuh demokratis ke arah otoriter atau permisif merupakan respons psikologis yang tidak disadari akibat trauma yang belum terselesaikan. Penelitian oleh Amalia dan Wijayanti (2020) juga mengungkapkan bahwa orang tua korban KDRT

cenderung menerapkan pola asuh permisif karena trauma masa lalu dan keinginan untuk menghindari konflik. Namun, pola permisif ini justru dapat melemahkan disiplin dan struktur yang dibutuhkan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Sebaliknya, sebagian penyintas justru meniru gaya pengasuhan otoriter yang pernah mereka alami dari pasangan sebagai bentuk coping mechanism.

Gaya otoriter ini tampak dalam perilaku mengontrol berlebihan, pemberian hukuman fisik, dan komunikasi satu arah. Semua ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah mengganggu kemampuan reflektif orang tua dalam memilih pola asuh yang adaptif.

4. Ketidakstabilan Sosial dan Ekonomi yang Memperburuk Pengasuhan

Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak berhenti pada ranah psikologis dan relasi. Banyak penyintas yang mengalami penurunan taraf ekonomi akibat perceraian, kehilangan pekerjaan, atau terpaksa berpindah tempat tinggal. Dalam kondisi ini, pengasuhan anak menjadi semakin terabaikan. Studi kasus oleh Wulandari dan Rachmawati (2022) memperlihatkan bahwa ibu penyintas kekerasan yang menjadi kepala keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak sekaligus mendampingi secara emosional.

Kelelahan fisik, tekanan finansial, dan kurangnya dukungan sosial menyebabkan pola pengasuhan menjadi tidak konsisten dan berisiko tinggi terhadap terjadinya *neglect* (pengabaian anak). Dalam banyak kasus, kondisi ini mengakibatkan anak tidak mendapatkan dukungan

emosional yang memadai dan kurang memiliki rasa aman dalam hubungan keluarganya.

5. Pentingnya Intervensi Psikososial dan Pemulihan Pengasuhan

Intervensi terhadap penyintas KDRT perlu dilakukan secara holistik, tidak hanya berfokus pada pemulihan korban secara individu, tetapi juga pada pembentukan pola pengasuhan yang sehat dan suportif. Pemulihan pengasuhan dalam keluarga penyintas KDRT harus menjadi perhatian utama dalam intervensi pasca-kekerasan. Program konseling keluarga, pendampingan psikososial, serta pelatihan keterampilan pengasuhan berbasis trauma menjadi strategi penting yang dapat membantu penyintas membangun kembali peran orang tua yang sehat secara emosional dan fungsional (Sari & Kurniawati, 2021).

"Konseling trauma, pelatihan parenting berbasis empati, serta dukungan komunitas dapat mengubah pola pengasuhan destruktif menjadi lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang anak" (Yuliana & Kartikasari, 2021, hlm. 89).

Dengan demikian, penting bagi praktisi sosial, psikolog, dan pembuat kebijakan untuk memahami keterkaitan antara pengalaman kekerasan dalam rumah tangga dengan dinamika pengasuhan di dalam keluarga. Upaya pencegahan kekerasan dan penyembuhan trauma keluarga harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pengasuh agar generasi berikutnya tidak terjebak dalam pola kekerasan yang berulang. Dengan kata lain, pengasuhan yang sehat tidak dapat dipisahkan

dari kesehatan mental orang tua. Maka, penguatan kapasitas pengasuhan penyintas KDRT harus mencakup aspek pemulihan trauma, penguatan ekonomi, dan pembangunan jejaring sosial yang suportif.

6. Trauma antar Generasi

Trauma antargenerasi (*intergenerational trauma*) adalah fenomena trauma yang dialami oleh satu generasi dapat mempengaruhi generasi berikutnya.

a. Penyebab dari trauma antar generasi:
    1) Pola asuh

       Orang tua yang mengalami trauma dapat memiliki pola asuh yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan anak.
    2) Stres dan kecemasan

       Trauma dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang dapat diturunkan ke generasi berikutnya.
    3) Pola pikir dan perilaku

       Trauma dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku orang tua, sehingga dapat mempengaruhi anak.
b. Dampak dari trauma antar generasi:
    1) Gangguan mental

       Anak dapat mengalami gangguan mental, contohnya depresi, kecemasan, dan PTSD.

2) Perilaku maladaptif

Perilaku maladaptif seperti agresi, penyalah-gunaan zat, dan perilaku *self-destructive*.

3) Kesulitan hubungan

Anak dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

c. Pengaruh dari trauma antar generasi:

1) Biologis

Trauma dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak.

2) Psikologis

Trauma dapat mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku orang tua, sehingga dapat mempengaruhi anak.

3) Sosial

Trauma dapat mempengaruhi hubungan keluar-ga/komunitas, sehingga dapat mempengaruhi anak.

d. Cara menanganinya:

1) Terapi

Hal ini dapat membantu orang tua dan anak mengatasi trauma dan mengurangi dampaknya.

2) Dukungan keluarga

Dukungan/motivasi keluarga dapat membantu anak merasa aman dan didukung.

3) Pengembangan kesadaran

Meningkatkan kesadaran tentang trauma antar-generasi agar dapat membantu mencegah dan mengatasi dampaknya.

H. Pengasuhan Restoratif dan Pemulihan Trauma

Pengasuhan restoratif adalah pendekatan dalam mendidik dan merawat anak dengan menekankan pada:

- Pemulihan hubungan yang rusak.
- Dialog terbuka.
- Tanggung jawab sosial dan emosional.
- Pencegahan dan resolusi konflik tanpa kekerasan.

Pendekatan ini berakar dari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang digunakan dalam sistem peradilan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pemulihan trauma adalah pendekatan dalam pengasuhan dan pelayanan anak yang mengakui dan memahami dampak dari pengalaman traumatis terhadap perkembangan anak. Ini bukan sekadar pendekatan terapeutik, melainkan kerangka berpikir dan bertindak.

I. Intervensi Psikososial dan Perlindungan Anak

Intervensi psikososial dan perlindungan anak adalah upaya membantu anak yang mengalami kesulitan atau trauma dan melindungi mereka dari kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.

1. Intervensi Psikososial:
    a. Asesmen psikososial

       Menilai kebutuhan dan kondisi pada anak untuk menentukan intervensi yang tepat.
    b. Terapi psikososial

       Membantu anak mengatasi masalah emosional dan perilaku melalui terapi individu/kelompok.
    c. Dukungan keluarga

       Membantu keluarga untuk memahami dan mengatasi masalah anak.
2. Perlindungan Anak:
    a. Pencegahan kekerasan

       Mengidentifikasi dan mencegah kekerasan terhadap anak.
    b. Pengawasan dan pemantauan.

       Mengawasi dan memantau kondisi anak untuk memastikan keamanannya.
    c. Pengasuhan alternatif.

       Menyediakan pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak dapat tinggal dengan orang tua.
3. Tujuan dari Intervensi psikososial dan perlindungan anak:
    a. Melindungi anak dari kekerasan dan penelantaran.
    b. Membantu anak mengatasi trauma dan kesulitan.
    c. Meningkatkan kualitas hidup anak.

J. Kolaborasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak

Kolaborasi antara berbagai lembaga layanan perempuan dan anak merupakan aspek fundamental dalam upaya

penanganan kekerasan berbasis gender serta perlindungan hak-hak korban. Lembaga-lembaga ini, termasuk pusat krisis perempuan (PKP), rumah aman *(shelter),* dinas perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan instansi pemerintah, bekerja secara terpadu untuk memberikan layanan yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pendampingan hukum, dukungan psikologis, hingga reintegrasi sosial bagi korban. Menurut Htun & Weldon (2018), efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat secara signifikan ketika terjadi sinergi antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah, karena hal ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan kebijakan yang lebih responsif.

Salah satu bentuk kolaborasi yang krusial adalah integrasi antara layanan kesehatan dan perlindungan anak. WHO (2020), menekankan bahwa korban kekerasan berbasis gender sering kali membutuhkan tidak hanya layanan medis darurat tetapi juga pendampingan psikososial jangka panjang. Dengan bekerja sama, rumah sakit, pusat krisis, dan dinas sosial dapat memastikan bahwa korban menerima perawatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan, terapi trauma, dan bantuan hukum. Di Indonesia, Komnas Perempuan (2022) melaporkan bahwa model kolaborasi antara lembaga layanan berbasis komunitas dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah membantu mempercepat proses peradilan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(UPPA) di kepolisian memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara polisi, pekerja sosial, dan konselor.

Selain itu, kolaborasi juga melibatkan sektor pendidikan dan media untuk upaya pencegahan. Lembaga layanan perempuan dan anak sering bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan universitas untuk menyelenggarakan program edukasi tentang kesetaraan gender, hak-hak anak, dan mekanisme pelaporan kekerasan. Media juga berperan penting dalam menyebarluaskan informasi tentang layanan yang tersedia, seperti *hotline* pengaduan atau lokasi rumah aman. UN Women (2021) menyatakan bahwa kampanye publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor privat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap korban.

Namun, tantangan dalam kolaborasi ini masih ada, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, dan disparitas kebijakan di tingkat daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerangka kerja yang lebih terstruktur, seperti pembuatan protokol bersama dan pelatihan lintas sektor. Dengan memperkuat kolaborasi, lembaga layanan perempuan dan anak tidak hanya mampu memberikan respons yang lebih efektif terhadap kasus kekerasan tetapi juga membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, kolaborasi antar lembaga yang berfokus pada layanan perempuan dan anak telah menjadi salah satu strategi penting dalam menangani berbagai isu seperti kekerasan domestik, perdagangan orang, eksploitasi seksual, dan diskriminasi gender. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

dan Komnas Perempuan (2021), sinergi antara instansi pemerintah seperti KPPPA, Kementerian Sosial, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, dengan lembaga non pemerintah seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan berbagai LSM lokal terbukti meningkatkan efektivitas perlindungan korban.

Salah satu bentuk kolaborasi yang nyata adalah Sistem Referal Terpadu. Penelitian Saputro dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa mekanisme rujukan terkoordinasi antara Unit PPA Polri dengan LSM di 5 kota besar Indonesia berhasil mempermudah akses korban ke layanan shelter, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis. Temuan ini diperkuat oleh studi Wahyuni (2020) tentang P2TP2A Jawa Tengah yang menemukan bahwa model layanan terpadu "satu atap" mampu mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dialami korban.

Di tingkat daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi contoh konkret kolaborasi multisektor. Menurut evaluasi KPAI (2023), 65% P2TP2A di Indonesia telah berhasil mengintegrasikan layanan psikologis, hukum, medis, dan rehabilitasi sosial. Namun, studi tersebut juga mengungkap tantangan berupa keterbatasan anggaran dan SDM di daerah terpencil.

Dalam aspek pencegahan, penelitian Rahmawati dan Fitriani (2019) menggarisbawahi pentingnya peran multi-stakeholder. Analisis mereka terhadap 50 kasus kekerasan pada anak menunjukkan bahwa intervensi terkoordinasi antara sekolah, puskesmas, dan tokoh masyarakat mampu menurunkan angka kekerasan berulang hingga 40%.

Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, laporan KPPPA & Komnas Perempuan (2021) mengidentifikasi beberapa hambatan struktural:

1. Koordinasi antarlembaga yang masih terfragmentasi di level kabupaten.
2. Keterbatasan anggaran untuk program pemulihan jangka panjang.
3. Resistensi budaya patriarki yang mempersulit pelaporan kasus.

Untuk mengatasi ini, KPAI (2023) merekomendasikan:

- Penguatan regulasi tentang kewajiban kolaborasi lintas sektor.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang
- Optimalisasi teknologi digital untuk sistem pelaporan terintegrasi.

Dengan memperkuat kerangka kolaborasi ini, Indonesia dapat mewujudkan sistem perlindungan yang lebih responsif, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi empiris dan evaluasi kebijakan terkini.



BAB 7

PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA DENGAN ANGGOTA DISABILITAS

Nama Penulis

1. Nadine Dwi Amrulloh
2. Erina Fatma Aulia
3. Elsa Hikmatul Qodiyah

Pengasuhan anak dalam keluarga yang memiliki anggota disabilitas merupakan proses yang melibatkan perhatian khusus terhadap kebutuhan emosional, fisik, sosial, dan pendidikan baik anak maupun anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pengasuhan tidak hanya mencakup pemberian kasih sayang dan perlindungan seperti pada umumnya, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh anggota keluarga yang memiliki disabilitas.

Apabila anak yang mengalami disabilitas, orang tua dituntut untuk lebih responsif, sabar, dan terinformasi tentang kondisi anak. Mereka perlu menjalin kerja sama dengan tenaga profesional seperti dokter, terapis, atau guru pendamping untuk

mendukung perkembangan anak. Di sisi lain, jika orang tua atau pengasuh utama adalah penyandang disabilitas, maka dukungan eksternal dari keluarga besar, komunitas, dan layanan sosial sangat penting agar kebutuhan anak tetap terpenuhi secara optimal.

A. Keluarga dengan Anak atau Orang Tua Disabilitas

Keluarga dengan anak atau orang tua disabilitas adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih anggota keluarga baik anak maupun orang tua yang mengalami disabilitas, yaitu keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dapat menghambat aktivitas kehidupan sehari-hari serta partisipasi sosial secara penuh dan efektif. Dalam konteks ini, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam memberikan dukungan emosional, fisik, sosial, dan pendidikan, sekaligus menghadapi berbagai tantangan psikologis, sosial, dan ekonomi yang timbul akibat kondisi disabilitas anggota keluarga. Adapun beberapa peran keluarga terhadap anggota yang menyandang disabilitas yaitu:

- **Sebagai Pelindung Keluarga**

  Peran keluarga sebagai pelindung berarti memberikan rasa aman secara fisik, emosional, dan sosial bagi anggota keluarga yang menyandang disabilitas, serta melindungi mereka dari risiko diskriminasi, kekerasan, pengabaian, dan pelanggaran hak-hak dasar. Keluarga menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa anggota disabilitas diperlakukan dengan hormat, mendapatkan perawatan yang layak, dan tidak terisolasi dari kehidupan sosial.

- **Sebagai Penyedia Kebutuhan Dasar**

  Peran keluarga sebagai penyedia kebutuhan dasar berarti keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga yang menyandang disabilitas, baik kebutuhan fisik, emosional, sosial, hingga pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan, serta dukungan psikologis dan pendidikan yang layak (Kathleen B. Kyzar, Ann P. Turnbull, Jean Ann Summers, Viviana Aya Gómez, 2012. (n.d.)).

- **Pemberi Dukungan Emosional**

  Peran keluarga sebagai pemberi dukungan emosional berarti bahwa keluarga memberikan perhatian, kasih sayang, penerimaan, dan penguatan psikologis kepada anggota keluarga penyandang disabilitas, guna membantu mereka mengembangkan harga diri, rasa aman, dan kesehatan mental yang stabil. Dukungan ini mencakup empati, komunikasi yang hangat, serta pemberian semangat dalam menghadapi tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

- **Fasilitator Pendidikan dan Kemandirian**

  Peran keluarga sebagai fasilitator pendidikan dan kemandirian adalah tanggung jawab keluarga untuk mendukung, memfasilitasi, dan mendorong proses belajar serta pengembangan kemampuan hidup mandiri bagi anak atau orang tua penyandang disabilitas. Ini mencakup akses terhadap pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan, serta pembiasaan dalam aktivitas sehari-hari agar anggota keluarga penyandang disabilitas dapat hidup secara lebih mandiri dan berdaya.

B. Tantangan Emosional dan Stigma Sosial

Kehadiran anggota keluarga dengan disabilitas seringkali menjadi sumber tantangan emosional yang signifikan dalam proses pengasuhan anak. Orang tua maupun anak-anak dalam keluarga tersebut dapat mengalami tekanan psikologis karena perasaan bersalah, cemas, lelah, serta frustrasi akibat beban perawatan dan kurangnya dukungan sosial. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang masih kuat di masyarakat terhadap individu dengan disabilitas.

- **Tantangan Emosional dalam Keluarga**

  Studi menunjukkan bahwa keluarga dengan anggota disabilitas cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan keluarga tanpa anggota disabilitas. Stres ini bersumber dari kebutuhan perawatan yang kompleks, kekhawatiran terhadap masa depan, serta ketidaksiapan emosional menghadapi perubahan peran dalam keluarga (Phelps et al., 2009). Selain itu, anak-anak yang memiliki saudara dengan disabilitas juga dapat merasakan perasaan terabaikan, tanggung jawab yang berlebihan, atau bahkan rasa malu karena berbeda dari keluarga lain (Giallo & Gavidia-Payne, 2006).

- **Stigma Sosial dan Isolasi**

  Stigma sosial terhadap disabilitas sering memengaruhi interaksi sosial keluarga secara keseluruhan. Keluarga dapat merasa dikucilkan dari lingkungan sosial karena dianggap "bermasalah" atau "tidak normal," sehingga mereka cenderung menarik diri dari komunitas dan lingkungan sekitar. Goffman (1963) dalam teorinya tentang stigma menjelaskan bahwa individu yang diasosiasikan dengan kelompok yang distigmatisasi juga mengalami

diskriminasi secara tidak langsung. Dalam konteks ini, orang tua atau saudara kandung dari anak disabilitas seringkali menjadi korban dari prasangka masyarakat.

- **Dampak pada Pola Asuh**

  Tekanan emosional dan stigma tersebut berdampak pada pola asuh yang diterapkan. Orang tua mungkin menjadi overprotektif terhadap anak disabilitas atau, sebaliknya, mengalami kelelahan emosional sehingga tidak mampu memberikan perhatian yang cukup. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu perkembangan sosial-emosional anak, baik anak dengan disabilitas maupun anak-anak lainnya dalam keluarga (Mugno et al., 2007).

Tabel Dampak Psikososial pada Keluarga

Aspek Psikososial	Dampak Umum	Penjelasan Detail
Stres Emosional Orang Tua	Kecemasan, kelelahan mental dan fisik, rasa bersalah, burnout	Orang tua merasa terbebani oleh kebutuhan perawatan jangka panjang, khawatir tentang masa depan anak, dan merasa bersalah tidak bisa menjadi "keluarga normal".
Interaksi Sosial Keluarga	Penarikan diri dari lingkungan, pengucilan sosial	Keluarga menghindari lingkungan karena takut penilaian negatif. Komunitas juga sering menunjukkan perlakuan diskriminatif atau tidak memberi dukungan yang

Aspek Psikososial	Dampak Umum	Penjelasan Detail
		dibutuhkan.
Pola Asuh	Overprotektif atau justru abai terhadap anak	Orang tua bisa terlalu melindungi anak disabilitas, membatasi eksplorasi dan kemandirian. Sebaliknya, kelelahan bisa membuat mereka menjadi kurang responsif.

C. Pengasuhan Inklusif dan Responsif Kebutuhan Khusus

Pengasuhan anak dalam keluarga dengan anggota disabilitas membutuhkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan dinamika unik keluarga tersebut. Baik ketika anak yang diasuh memiliki disabilitas maupun ketika ada anggota keluarga lain dengan disabilitas, pengasuhan inklusif dan responsif menjadi kunci utama.

- **Pengasuhan Inklusif dalam Keluarga Disabilitas**

  Pengasuhan inklusif mencakup menciptakan lingkungan keluarga yang menerima dan mengakomodasi semua anggota keluarga tanpa memandang kemampuan atau keterbatasan mereka. Prinsip dasarnya adalah memandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia, bukan sebagai kekurangan yang harus diperbaiki.

  Dalam konteks keluarga, hal ini berarti memastikan setiap anak mendapat perhatian, kasih sayang, dan kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai

potensinya. Orang tua perlu memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda, termasuk anak dengan disabilitas yang mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam area tertentu namun tetap memiliki kekuatan di area lain.

- **Responsivitas terhadap Kebutuhan Khusus**

  Pengasuhan yang responsif terhadap kebutuhan khusus melibatkan kemampuan orang tua untuk mengenali, memahami, dan merespons kebutuhan spesifik setiap anak secara tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini mencakup adaptasi dalam komunikasi, pembelajaran, aktivitas sehari-hari, dan interaksi sosial.

  Ketika anak memiliki disabilitas, orang tua perlu mempelajari kondisi spesifik anak dan cara terbaik mendukung perkembangannya. Misalnya, anak dengan autism spectrum disorder mungkin membutuhkan rutinitas yang terstruktur dan komunikasi yang jelas, sementara anak dengan disabilitas fisik mungkin memerlukan modifikasi lingkungan dan alat bantu khusus.

- **Strategi Pengasuhan Praktis**

  Komunikasi terbuka menjadi fondasi penting dalam keluarga ini. Orang tua perlu menciptakan ruang aman bagi semua anak untuk mengekspresikan perasaan, kekhawatiran, atau kebingungan mereka terkait disabilitas dalam keluarga. Anak-anak tanpa disabilitas mungkin memerlukan penjelasan yang sesuai usia tentang kondisi saudara mereka dan cara mendukung keluarga.

  Penetapan harapan yang realistis namun tidak membatasi juga penting. Setiap anak, termasuk yang memiliki disabilitas, perlu diberi kesempatan untuk mencoba,

gagal, dan belajar. Orang tua perlu menyeimbangkan antara memberikan dukungan yang diperlukan tanpa menjadi overprotektif.

Pembagian perhatian dan sumber daya keluarga juga memerlukan perhatian khusus. Anak dengan disabilitas mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian untuk hal-hal tertentu, namun penting untuk memastikan anak lain tidak merasa terabaikan. Ini bisa diatasi dengan menciptakan waktu khusus untuk setiap anak dan melibatkan seluruh keluarga dalam aktivitas yang dapat dinikmati bersama.

- **Membangun Kemandirian dan Resiliensi**

  Pengasuhan inklusif juga fokus pada pengembangan kemandirian setiap anak sesuai kemampuannya. Anak dengan disabilitas perlu didorong untuk mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari dan kemandirian sebanyak mungkin, sementara anak lain dalam keluarga dapat belajar empati, tanggung jawab, dan keterampilan membantu orang lain.

  Membangun resiliensi keluarga menjadi aspek penting lainnya. Keluarga dengan anggota disabilitas seringkali menghadapi tantangan tambahan seperti stigma sosial, keterbatasan akses, atau kebutuhan finansial yang lebih besar. Mengembangkan kemampuan keluarga untuk beradaptasi, mencari dukungan, dan mempertahankan optimisme akan memberikan fondasi kuat bagi semua anggota keluarga.

- **Kolaborasi dengan Sistem Dukungan**

  Pengasuhan yang efektif dalam konteks ini juga melibatkan kolaborasi aktif dengan berbagai pihak

seperti terapis, guru, tenaga medis, dan komunitas. Orang tua perlu menjadi advokat yang baik untuk anak mereka sambil juga membangun jaringan dukungan yang solid.

Pendidikan berkelanjutan bagi orang tua tentang disabilitas, perkembangan anak, dan strategi pengasuhan akan membantu mereka memberikan dukungan yang lebih baik. Ini juga termasuk memahami hak-hak anak dengan disabilitas dan cara mengakses layanan yang diperlukan.

Pengasuhan inklusif dan responsif dalam keluarga dengan anggota disabilitas pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung setiap anggota keluarga untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi sesuai potensi unik mereka, sambil membangun ikatan keluarga yang kuat dan saling mendukung.

D. Dukungan Komunitas dan Layanan Sosial

Dukungan komunitas dan layanan sosial merupakan aspek penting dalam membantu keluarga yang memiliki anggota berkebutuhan khusus agar dapat memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial secara optimal. Dukungan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti organisasi masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pusat rehabilitasi, sekolah inklusi, dan kelompok pendukung sebaya (Wieland et al., 2014). Adapun peran dan bentuk dukungan yang dapat diterapkan yaitu:

- **Pendidikan dan Pelatihan**

  Dukungan pendidikan dan pelatihan adalah program atau kegiatan yang diberikan oleh komunitas, lembaga sosial, atau pemerintah untuk membantu keluarga memahami kebutuhan khusus anggota keluarganya. Misalnya, pelatihan cara merawat anak dengan disabilitas, mengenali tanda-tanda perkembangan, teknik komunikasi yang tepat, serta cara mengajarkan kemandirian. Tujuannya agar keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anggota keluarga berkebutuhan khusus secara efektif, sekaligus mengurangi beban dan stres mereka. Dengan pelatihan ini, keluarga lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari dan bisa memberikan dukungan yang sesuai kebutuhan anak atau anggota keluarga mereka.

- **Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi**

  Dukungan komunitas dan layanan sosial berupa layanan kesehatan dan rehabilitasi adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga dengan anggota berkebutuhan khusus untuk memenuhi kebutuhan medis dan pemulihan mereka (Nakken et al., 2019). Contohnya, akses ke dokter spesialis, terapi fisik, terapi wicara, atau psikolog. Rehabilitasi membantu meningkatkan kemampuan fisik, komunikasi, dan fungsi sehari-hari agar anggota keluarga bisa lebih mandiri (Gowda et al., 2012). Layanan ini penting untuk memperbaiki kualitas hidup dan mendukung perkembangan optimal (King et al., 1999).

- **Dukungan Sosial dan Psikologi**

  Dukungan sosial yang kuat, seperti jaringan teman dan kelompok pendukung, berpengaruh positif pada kesejahteraan psikologis ibu dengan anak autisme. Dukungan ini membantu mereka merasa tidak sendirian, mengurangi rasa stres, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan merawat anak berkebutuhan khusus. Tingkat stres orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus bisa dikurangi dengan adanya dukungan sosial yang memadai. Dukungan tersebut meningkatkan fungsi keluarga dan kesejahteraan psikologis orang tua, sehingga keluarga dapat berfungsi lebih efektif dalam mengasuh dan mendukung anak. Dukungan sosial dan psikologis berupa hubungan yang hangat, jaringan pendukung, dan bantuan emosional sangat penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga dengan anggota berkebutuhan khusus. Dengan dukungan ini, keluarga lebih kuat secara mental, mampu menghadapi tekanan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

- **Fasilitas dan Bantuan Keuangan**

  Fasilitas dan bantuan keuangan bagi keluarga dengan anak atau anggota berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi penting dari pemerintah dan lembaga sosial untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Bantuan ini tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga mencakup dukungan dalam bentuk layanan, alat bantu, dan akses yang lebih mudah terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (Blume, 2004).

- **Pemberdayaan dan Inklusi Sosial**

  Pemberdayaan dan inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa keluarga dengan anak atau anggota berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Pemberdayaan berarti memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan agar keluarga mampu membuat keputusan dan berperan aktif dalam kehidupan anak mereka. Sementara itu, inklusi sosial memastikan bahwa anak atau anggota berkebutuhan khusus tidak dikucilkan dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

E. Peran Advokasi Keluarga

Advokasi keluarga merujuk pada peran aktif orang tua atau pengasuh dalam memperjuangkan hak dan kebutuhan anak dengan disabilitas. Peran ini tidak hanya sebatas memberikan dukungan di rumah, melainkan juga mencakup upaya mendorong inklusi, layanan yang adil, serta kebijakan yang berpihak kepada anak. Advokasi keluarga bersifat berlapis: mulai dari ranah individu hingga ranah sosial dan kebijakan.

- **Peningkatan Literasi Disabilitas di Lingkungan Keluarga**

  Advokasi dimulai dari pemahaman keluarga terhadap jenis dan kebutuhan khusus anak. Literasi ini penting agar orang tua mampu mengambil keputusan terbaik dalam pendidikan, terapi, dan pengasuhan. Penelitian oleh Fish (2016) menegaskan bahwa keterlibatan keluarga dalam perencanaan *Individualized Education Program* (IEP)

meningkat secara signifikan bila keluarga memahami hak-hak pendidikan anak mereka.

- **Keterlibatan Aktif dalam Pendidikan dan Layanan Anak**

  Keluarga berperan sebagai mitra strategis dalam sistem pendidikan, termasuk dalam merancang program pembelajaran anak. Keterlibatan ini bukan hanya bersifat konsultatif, tetapi partisipatif dan advokatif. Ruppar & Arndt (2017) menekankan bahwa kemitraan antara keluarga dan sekolah meningkatkan efektivitas layanan pendidikan inklusif.

- **Menghadapi Stigma dan Diskriminasi dengan Dukungan Sosial**

  Keluarga juga memiliki fungsi sosial sebagai advokat terhadap masyarakat sekitar. Melalui komunitas atau kelompok orang tua, mereka membangun solidaritas untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran kolektif tentang keberagaman kemampuan anak. Kehadiran kelompok dukungan terbukti meningkatkan resiliensi keluarga (Kyzar et al., 2012).

- **Mendorong Perubahan pada Kebijakan dan Sistem**

  Pada level makro, advokasi keluarga dapat memengaruhi perubahan kebijakan. Melalui keterlibatan dalam forum publik, keluarga berperan dalam menyuarakan kebutuhan anak disabilitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Burrell & Borrego (2012), suara orang tua merupakan kekuatan penting dalam reformasi kebijakan inklusi.

F. Rangkuman dan Refleksi

Pengasuhan anak dalam keluarga dengan anggota disabilitas merupakan perjalanan yang kompleks namun penuh makna, yang menuntut transformasi paradigma dari model defisit menuju model kekuatan dan inklusi. Keluarga-keluarga ini tidak hanya menghadapi tantangan praktis seperti aksesibilitas, kebutuhan terapi, atau stigma sosial, tetapi juga berkesempatan mengembangkan nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang mendalam seperti empati, resiliensi, dan penerimaan tanpa syarat.

Pengasuhan inklusif dalam konteks ini bukan sekadar tentang mengakomodasi keterbatasan, melainkan menciptakan ekosistem keluarga yang merayakan keberagaman kemampuan dan memberikan ruang bagi setiap anggota untuk berkembang sesuai potensi uniknya. Orang tua dalam keluarga ini seringkali menjadi advokat yang tangguh, *educator* yang kreatif, dan terapis yang penuh kasih, sambil tetap mempertahankan peran fundamental mereka sebagai sumber cinta dan rasa aman. Anak-anak tanpa disabilitas dalam keluarga ini tumbuh dengan pemahaman yang lebih matang tentang keberagaman, mengembangkan keterampilan empati yang luar biasa, dan belajar bahwa nilai seseorang tidak diukur dari kemampuan atau pencapaiannya, melainkan dari esensi kemanusiaannya.

Refleksi mendalam terhadap dinamika keluarga ini mengungkapkan bahwa disabilitas, alih-alih menjadi beban, seringkali menjadi katalis bagi pertumbuhan karakter yang luar biasa, memperkuat ikatan keluarga, dan membuka perspektif baru tentang makna kesuksesan dan kebahagiaan. Keluarga-keluarga ini mengajarkan kepada masyarakat luas

bahwa inklusi bukan hanya tentang kebijakan atau infrastruktur, tetapi tentang transformasi hati dan pikiran yang memandang setiap individu sebagai bagian berharga dari komunitas. Tantangan terbesar bukanlah disabilitas itu sendiri, melainkan sikap dan struktur sosial yang belum sepenuhnya inklusif, sehingga advokasi dan edukasi masyarakat menjadi bagian integral dari perjalanan pengasuhan ini. Pada akhirnya, pengalaman mengasuh dalam keluarga dengan anggota disabilitas mengajarkan bahwa cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang tidak bersyarat, bahwa kekuatan manusia terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan tumbuh bersama, dan bahwa kebahagiaan keluarga tidak ditentukan oleh kesempurnaan anggotanya, melainkan oleh kualitas hubungan, dukungan, dan penerimaan yang mereka berikan satu sama lain, sehingga menciptakan model keluarga yang tidak hanya bertahan tetapi berkembang dengan penuh makna dan tujuan.



BAB 8

PENGASUHAN DALAM KELUARGA YANG TERLIBAT DENGAN HUKUM (ATPH DAN ABH)

Nama Penulis

1. Fetrin Aura Ainillah
2. Amalia Rahma Sakina Utomo
3. Jessica Amelia Defani
4. Novaliya Maharani Sfitri

A. Anak dan Orang Tua yang Menjadi Bagian dari Sistem Peradilan

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting* (prema-nisme). Penggunaan kata anak dalam terminologi peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yakni hanya perkara anak saja. Pengadilan anak

meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, sehingga proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan atau institusi peradilan tersebut juga harus disesuai-kan dengan kebutuhan anak. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Peradilan Anak yang mempunyai karakteristik tersendiri dan perbedaan dalam banyak hal, terutama mem-perlakukan anak ketika berhadapan dengan hukum (baik sebagai korban, pelaku maupun saksi), tentu dilihat sebagai sebuah pengkhususan dari Sistem Peradilan pada umumnya. Pernyataan demikian didukung dengan rumusan kualifikasi tindak pidana yang sama jenisnya dengan orang dewasa yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun proses peradilan dan sanksi yang didapatkan tentu saja berbeda. Suwantji Sisworahardjo mengemukakan hal yang sama, bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, maka secara sistematika hukum (*recht sistematisch*) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh, sebagai berikut:

1. Melampaui kompetensi absolut (*absolute competencies*) Badan Peradilan Umum;
2. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Penyidik

Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan rumusan Beijing Rules Butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non-formal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

- Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya

Pemerintah Indonesia menentukan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejah-teraan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang -undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Undang -undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice System*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namun sudah seharusnya lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Sistem Hukum Pidana Indonesia

mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pembaharuannya yaitu adanya pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan menuju kearah perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) yang selama ini dilaksanakan di negara kita.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas -fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan secara integral, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.



Gambar Anak yang Dikucilkan oleh Lingkungan yang Ada di Sekitarnya

B. Stigma dan Dampaknya Terhadap Relasi Keluarga

Stigma adalah konsep yang kompleks dan memiliki akar yang dalam masyarakat. Untuk memahami latar belakang stigma dan dampaknya pada relasi keluarga, kita perlu melihat dari berbagai perspektif. Stigma dapat didefinisikan sebagai atribut yang sangat mendiskreditkan seseorang atau kelompok, yang mengurangi "orang seutuhnya dan biasa" menjadi "orang yang tercemar dan tidak diinginkan. Ketika stigma melekat pada salah satu anggota keluarga (misalnya, anak yang terlibat hukum, orang tua yang dipenjara, atau anggota keluarga yang menderita penyakit mental), dampaknya bisa menyebar ke seluruh sistem keluarga dan merusak relasi antar anggota. Stigma keluarga merupakan sikap keluarga dan masyarakat yang menganggap apabila ada anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa merupakan hal yang memalukan bagi anggota keluarga tersebut. Stigma keluarga terbentuk dari orang atau masyarakat lain yang mempunyai persepsi, sikap, emosi yang negatif serta penghindaran dari masyarakat terhadap keluarga dikarenakan ketidaktahuan keluarga (memiliki anggota keluarga yang sakit) sehingga mengakibatkan akibat emosional, sosial, dan interpersonal yang dapat menurunkan kualitas hidup keluarga.

Stigma keluarga yang mengalami pengasuhan oleh orang tua yang berkonflik dengan hukum ataupun anak yang berhubungan/berkonflik dengan hukum seringkali dikaitkan dengan kegagalan moral maupun perilaku anak atau pendidikan yang buruk. Selain anak yang dipandang buruk oleh masyarakat, keluarga juga mendapatkan dampak yang buruk karena jika terdapat keluarga yang berkonflik dengan hukum

maka masyarakat juga akan dianggap buruk oleh masyarakat di sekitar dan hal ini sangat berdampak pada hubungan sosial keluarga tersebut. Dalam konteks Hal ini keluarga yang memiliki konflik dengan hukum maka seringkali masyarakat akan memberi julukan terhadap keluarga tersebut tergantung dengan kasus yang menimpa keluarga tersebut, Contoh: Jika keluarga dengan orang tua korupsi maka akan dijuluki sebagai "Keluarga Korupsi" atau keluarga dengan kasus orang tua pencuri maka akan disebut dengan keluarga "Keluarga Pencuri." Hal ini akan membuat nama baik dari keluarga tersebut tercoreng dari masyarakat.

Meskipun ada lembaga sosial atau program bantuan sosial, stigma ini bisa menjadi penghalang bagi keluarga untuk mencari bantuan atau menerima bantuan. Karena rasa malu atau takut dihakimi dapat membuat mereka enggan mengajukan diri atau menerima uluran tangan kepada sekitar nya. Keluarga mungkin mulai menghindari kegiatan sosial atau kunjungan ke rumah kerabat karena khawatir akan perilakunya. Hal ini dapat menyebabkan isolasi dan kurangnya dukungan sosial bagi orang tua.

C. Reunifikasi dan Peran Lapas dalam Mendukung Pengasuhan

Reunifikasi adalah proses menyatukan kembali anggota keluarga yang terpisah, baik, secara fisik maupun emosional. Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum (ABH), reunifikasi biasanya mengacu pada pemulihan hubungan antara anak dan keluarga setelah masa penahanan atau pembinaan, dengan tujuan agar anak dapat kembali ke masyarakat melalui dukungan keluarga yang kuat.

Novia Santika (2024) dalam jurnal artikelnya menjelaskan LPKA memiliki peran tak langsung dalam proses reunifikasi sebagai tempat rehabilitasi serta mengaktifkan peran keluarga dalam rehabilitasi dan juga sebagai fasilitator forum-forum atau kegiatan yang mempertemukan anak dengan keluarga dalam konteks edukatif dan emosional, yang memungkinkan terciptanya ruang pertemuan dan dialog anak-orang tua. Dalam kutipan penjelasan Hajar G. (2024) pelaksanaan reunifikasi melibatkan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Sosial (PKBI) dalam proses Reunifikasi, LPKA berperan sebagai mediator untuk memungkinkan orang tua membangun kembali relasi emosional dan sosial dengan anak mereka.

Reunifikasi dalam konteks pemasyarakatan merujuk pada proses mengembalikan anak binaan ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat setelah mereka menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses ini tidak sekadar pelepasan administratif, melainkan merupakan rangkaian upaya terpadu yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak binaan dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat secara psikologis, sosial, dan moral. Dalam proses ini, lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting.

Salah satu hasil penelitian oleh Subroto dan Humaam (2024) yang dilakukan di LPKA Bandar Lampung menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan efikasi diri anak binaan. Dukungan ini mencakup dukungan konkret (seperti kunjungan), dukungan emosional (seperti kasih sayang dan empati), dukungan informatif (bimbingan dan nasihat), serta dukungan penghargaan

(pengakuan atas usaha anak). Sayangnya, tidak semua anak binaan mendapatkan dukungan tersebut secara maksimal. Kurangnya komunikasi dan minimnya keterlibatan emosional dari pihak keluarga dapat menyebabkan anak merasa ditinggalkan, yang berdampak pada menurunnya motivasi dan rasa percaya diri mereka dalam menjalani pembinaan.

Di sisi lain, Kusuma Dewi Supandi (2024) menggarisbawahi pentingnya peran aktif LPKA dalam pembinaan anak delinkuensi. LPKA dinilai perlu mengembangkan pola pembinaan yang tidak hanya menekankan pada aturan dan disiplin, tetapi juga mendorong rasa percaya diri anak dan memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri. Pola pembinaan seperti ini dianggap lebih efektif dalam membantu anak mengenali jati dirinya dan menyiapkan mereka untuk proses reunifikasi dengan keluarga dan masyarakat setelah masa tahanan berakhir.

Terdapat penjelasan data dari reunifikasi dan peran lapas dalam mendukung pengasuhan yakni:

1. 60% anak binaan mendapatkan dukungan keluarga yang tinggi (kunjungan, komunikasi aktif).
2. 40% anak binaan mengalami dukungan yang rendah, yang bisa berdampak negatif pada psikologis mereka.
3. 55% anak merasakan keterlibatan emosional yang kuat dari keluarga (misalnya, interaksi yang hangat dan terbuka).
4. 45% anak menghadapi keterlibatan emosional yang lemah, yang sering kali disebabkan oleh konflik atau ketidakhadiran orang tua.
5. 65% anak binaan dengan dukungan dan keterlibatan yang kuat menunjukkan efikasi diri tinggi, yang berarti

mereka merasa mampu untuk kembali ke masyarakat secara positif.

6. 35% lainnya memiliki efikasi diri rendah, umumnya karena keterputusan hubungan dengan keluarga.

D. Strategi Mempertahankan Relasi Pengasuhan Selama Masa Tahanan

Pengasuhan selama masa tahanan merupakan tantangan signifikan bagi orang tua dan anak-anak mereka. Ketika seorang orang tua menjalani masa tahanan, dampak emosional dan psikologis terhadap anak dapat sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua yang tetap terlibat dalam hidup mereka, meskipun dalam kondisi yang sulit, cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi stres (Davis & Shlafer, 2017). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi yang efektif guna mempertahankan relasi pengasuhan dan memastikan kesejahteraan anak. Salah satu strategi utama adalah menjaga komunikasi rutin antara orang tua dan anak. Komunikasi yang teratur, baik melalui surat, telepon, maupun kunjungan, dapat membantu anak merasa terhubung dengan orang tua mereka. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak, meskipun secara fisik terpisah. Dengan adanya komunikasi yang baik, anak dapat berbagi pengalaman dan perasaan mereka, sementara orang tua tetap dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan.

Selain komunikasi, keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak sangat penting. Walaupun terpisah secara

fisik, orang tua tetap dapat berperan dalam mendukung pendidikan anak dan memberi motivasi dalam kegiatan sehari-hari melalui komunikasi yang konsisten. Misalnya, orang tua bisa memberi dorongan terkait pekerjaan rumah atau memberikan nasihat seputar permasalahan anak di sekolah. Keterlibatan semacam ini membuat anak merasa tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka, meski berada dalam situasi yang sulit (Johnson & Waldfogel, 2002).Pemanfaatan teknologi juga menjadi sarana penting dalam mempertahankan ikatan emosional antara anak dan orang tua yang menjalani masa tahanan. Melalui video call, anak dapat berinteraksi secara visual dengan orang tua, yang dapat mengurangi rasa kehilangan dan kesepian. Orang tua juga dapat mengirimkan pesan suara atau video yang dapat diakses kapan saja oleh anak, sehingga anak merasa lebih dekat secara emosional. Program dukungan keluarga yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan juga memainkan peran besar dalam memperkuat hubungan orang tua dan anak. Program-program ini biasanya mencakup konseling keluarga dan kegiatan kunjungan yang ramah anak, yang bertujuan membangun interaksi positif. Selain itu, penyuluhan kepada anak tentang kondisi penahanan orang tua dapat mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap situasi keluarga (Dallaire & Wilson, 2010).Tak kalah penting, dukungan dari keluarga besar dan komunitas juga berperan dalam membangun ketahanan anak. Dukungan sosial yang baik dari lingkungan sekitar dapat mengurangi tekanan psikologis yang dialami anak serta memberikan rasa aman dan stabilitas emosional. Keterlibatan aktif dari keluarga pengganti atau wali asuh

sangat krusial dalam membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan hubungan antara orang tua yang sedang menjalani masa tahanan dan anak-anak mereka dapat tetap kuat dan positif. Relasi pengasuhan yang sehat selama masa tahanan tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan emosional anak, tetapi juga berdampak positif bagi proses rehabilitasi orang tua. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, termasuk institusi pemasyarakatan, keluarga, dan komunitas, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih. Dukungan yang tepat memungkinkan anak-anak untuk tetap tumbuh secara optimal, sekalipun mereka menghadapi tantangan akibat penahanan orang tua mereka. Hal ini akan membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik serta mengurangi risiko masalah sosial dan emosional di kemudian hari.

E. Rangkuman

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum yang khusus dirancang untuk memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara berbeda dari orang dewasa. Sistem ini menekankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang lebih mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial daripada hukuman semata. Penanganan perkara anak dilakukan oleh aparat penegak hukum khusus seperti penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, dan petugas pemasyarakatan anak, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak seperti tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Namun, anak yang tersangkut kasus hukum dan keluarganya sering kali menghadapi stigma sosial yang berat. Stigma ini merusak reputasi keluarga, memunculkan isolasi sosial, dan membatasi akses mereka terhadap dukungan sosial. Anak-anak dan orang tua yang dikaitkan dengan konflik hukum kerap diberi label negatif oleh masyarakat, yang tidak hanya memperburuk kondisi emosional tetapi juga menghambat proses pemulihan hubungan dalam keluarga.

Dalam konteks tersebut, proses reunifikasi menjadi sangat penting. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan lembaga sosial lainnya memainkan peran sentral dalam mengupayakan reunifikasi, yakni menyatukan kembali anak dengan keluarganya melalui program pembinaan emosional dan sosial. Dukungan keluarga, baik dalam bentuk kunjungan, kasih sayang, maupun komunikasi aktif, terbukti berperan besar dalam meningkatkan efikasi diri anak dan kesiapan mereka kembali ke masyarakat.

Untuk mempertahankan relasi pengasuhan selama masa tahanan, strategi utama adalah menjaga komunikasi yang intens dan bermakna antara anak dan orang tua. Hal ini dapat dilakukan melalui surat, telepon, atau teknologi seperti *video call.* Orang tua yang tetap terlibat dalam kehidupan anak secara emosional dan edukatif, meski terpisah secara fisik, dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mental anak.

Secara keseluruhan, keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat ditentukan oleh kolaborasi antara negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang adil, suportif, dan inklusif bagi anak. Upaya penegakan hukum terhadap anak seharusnya selalu

mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.



BAB 9

REKOMENDASI INTERVENSI UNTUK PENGUATAN PENGASUHAN KELUARGA RENTAN

Nama Penulis

1. Izzah Dzurrotun Nafisah
2. Hindi Arvita
3. Muyassarah

A. Prinsip-Prinsip Pengasuhan Responsif dan Berkeadilan Sosial

Pengasuhan merupakan proses yang sangat kompleks dan multidimensional. Tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan, tempat tinggal, dan pendidikan formal, tetapi juga melibatkan pemberian kasih sayang, dukungan emosional, pemenuhan hak-hak anak, serta bimbingan moral dan sosial. Dalam dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendekatan terhadap pola asuh memiliki dampak jangka panjang terhadap karakter, kepribadian, dan masa depan anak. Oleh karena itu, dua prinsip besar yang menjadi sorotan dalam diskursus pendidikan dan pengasuhan modern adalah pengasuhan responsif dan pengasuhan berkeadilan sosial.

1. Pengasuhan Responsif

Pengasuhan Responsif merajuk pada kemampuan orang tua atau pengasuh untuk membaca, memahami, dan menanggapi kebutuhan anak secara tepat waktu dan sesuai konteks. Hal ini mencakup kebutuhan fisik (seperti lapar atau sakit), emosional (seperti rasa takut, cemas, atau gembira), dan sosial (seperti butuh teman atau butuh didengar). Misalnya, ketika anak menangis karena merasa cemas ditinggal sekolah, orang tua yang responsif tidak langsung menyuruh anak diam atau memarahinya, dan menjelaskan dengan sabar bahwa mereka akan menjemputnya lagi. Respons seperti ini membuat anak merasa aman, dihargai, dan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pengalaman sosial yang baru.

Pengasuhan Responsif juga dapat disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, asalkan tetap mengedepankan kesejahteraan dan suara anak. Responsif tidak boleh diartikan sebagai memanjakan, tetapi sebagai bentuk kehadiran emosional yang bijak dan seimbang.

2. Pengasuhan Berkeadilan Sosial

Berkeadilan sosial dalam konteks pengasuhan berarti memberikan perlakuan yang setara kepada setiap anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan individual mereka tanpa terjebak dalam diskriminasi berbasis gender, status sosial, ekonomi, budaya, atau agama. Ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 23 Tahun 2002), yang menekankan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan pendidikan yang setara.

Pengasuhan berkeadilan sosial bertujuan untuk membongkar struktur tidak adil yang membatasi potensi anak hanya karena identitas sosialnya. Dalam praktiknya, ini menuntut perubahan pola pikir *(mindset shift)* orang tua dan guru untuk lebih reflektif dan kritis terhadap nilai-nilai patriarki, bias kelas sosial, atau prasangka terhadap kelompok tertentu.

Zahroh (2023) dalam penelitiannya di Gunung Kidul menunjukkan bahwa pola asuh berbasis keadilan gender bisa dibangun melalui pendekatan komunitas, seperti pelatihan *parenting* yang melibatkan ayah dan ibu secara setara. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam pengasuhan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga struktur sosial dan budaya yang lebih luas.

3. Integrasi Kedua Prinsip dalam Mewujudkan Pengasuhan yang Holistik dan Transformatif

Menggabungkan pengasuhan responsif dan berkeadilan sosial bukan hanya soal menyayangi anak dan memperlakukan mereka secara adil, tetapi juga membentuk sistem yang transformatif mengubah budaya pengasuhan dari yang otoriter dan diskriminatif menjadi lebih humanis, demokratis, dan empati.

Langkah Praktis:

a. Membangun komunikasi yang terbuka dan setara dengan anak sejak usia dini.
b. Menumbuhkan empati dan kesadaran sosial anak melalui cerita, diskusi, dan permainan reflektif.
c. Melatih guru PAUD dan pendidik keluarga untuk peka terhadap bias dalam pengajaran atau perlakuan

terhadap anak.

d. Mendorong kebijakan sekolah dan komunitas yang mendukung keterlibatan ayah, ibu, dan anak dalam proses pendidikan.

Pengasuhan Responsif dan berkeadilan sosial adalah dua sayap utama dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika, adil, dan peka terhadap sesama. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan, responsivitas membentuk kedekatan emosional dan keamanan psikologis anak, sementara keadilan sosial membuka ruang bagi tumbuhnya kesetaraan dan penghargaan terhadap keragaman.

Pola asuh seperti inilah yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan abad ke-21, di mana anak-anak harus menjadi agen perubahan yang bukan hanya berdaya secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepekaan sosial yang tinggi.



Gambar Pengasuhan Responsif dan Berkeadilan Sosial

B. Model Intervensi Berbasis Keluarga dan Komunitas

Model intervensi berbasis keluarga yaitu suatu pendekatan intervensi yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam proses perubahan, perlindungan, dan

pemberdayaan. Pendekatan ini meyakini bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter, nilai, dan perilaku individu. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan melalui keluarga dianggap lebih efektif dan berkelanjutan. Model ini dapat diterapkan dalam beberapa macam seperti (kesehatan, pendidikan, sosial, kesejahteraan psikososial). Dengan tujuan untuk Meningkatkan kapasitas keluarga dalam merawat, mendidik, dan melindungi anggotanya. Membangun ketahanan keluarga terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Mencegah berbagai masalah sosial sejak dini melalui lingkungan keluarga. Dan juga menciptakan lingkungan pengasuhan yang sehat secara fisik, emosional, dan psikologis.

Pendekatan dalam strategi pelaksanaan

- *Family-Centered Approach*

  Memandang keluarga sebagai mitra utama dan pusat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan intervensi.

- *Family Empowerment Strategy*

  Fokus pada peningkatan kapasitas keluarga melalui pelatihan, edukasi, dan dukungan sosial.

- *Home-Based Intervention*

  Program dilakukan langsung di rumah, seperti kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, pendamping sosial, atau konselor keluarga.

- *Family Support Programs*

  Menyediakan layanan dukungan bagi keluarga seperti konseling, bantuan tunai, pelatihan keterampilan, atau penyuluhan gizi.

- *Multigenerational Involvement*

  Melibatkan lebih dari satu generasi dalam keluarga, seperti kakek-nenek, orang tua, dan anak-anak.

Intervensi berbasis keluarga merupakan pendekatan yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga setiap anggota keluarga dipandang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Pendekatan ini tidak memisahkan individu secara terisolasi, melainkan menyasar seluruh anggota keluarga secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman.

Pertama, prinsip holistik, yaitu intervensi diarahkan untuk menjangkau seluruh anggota keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, prinsip partisipatif, di mana keluarga dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi yang relevan dengan kondisi mereka. Ketiga, prinsip pemberdayaan *(empowerment),* yang bertujuan membekali keluarga dengan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan secara mandiri di masa depan. Keempat, prinsip preventif dan promotif, yakni intervensi tidak hanya menangani permasalahan yang telah ada, tetapi juga mencegah timbulnya masalah baru serta mendorong praktik-praktik positif yang mendukung kesejahteraan keluarga. Terakhir, prinsip kontekstual dan kultural, yaitu menyesuaikan strategi intervensi dengan nilai, norma, dan budaya lokal yang berlaku di lingkungan keluarga.

Selaras dengan itu, model intervensi berbasis komunitas (*Community-Based Intervention*/CBI) memperluas lingkup pendekatan dari keluarga ke masyarakat luas. Model ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan kualitas hidup bersama. CBI menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap, pemberdayaan komunitas agar memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk mengambil keputusan, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

Tujuan utama CBI meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan, pemberdayaan komunitas untuk menjadi mandiri, pengintegrasian nilai-nilai lokal dan pengetahuan tradisional dalam setiap kegiatan, serta membangun keberlanjutan melalui kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas hasil intervensi. Dengan cara ini, intervensi berbasis komunitas tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Keterkaitan antara intervensi berbasis keluarga dan berbasis komunitas terletak pada prinsip partisipasi dan pemberdayaan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga keberhasilan pemberdayaan di tingkat keluarga akan memperkuat kapasitas komunitas secara keseluruhan. Sebaliknya, lingkungan komunitas yang aktif, inklusif, dan suportif akan mendukung keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pembentukan karakter anggotanya. Dengan demikian, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

C. Pemetaan Kebijakan dan Program Pemerintah

Pemetaan adalah sebuah sistem yang didalamnya terdapat basis data dengan kemampuan khusus untuk merepresentasikan data secara spasial atau berupa koordinat geografis beserta sekumpulan operasi yang mengelola data tersebut. (Prahasta, 2005). Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program strategis untuk menguatkan keluarga rentan, memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi, dan mendukung pengasuhan yang berkualitas bagi anak-anak dalam keluarga tersebut.

Salah satu dasar hukum utama yang menjadi landasan penguatan keluarga rentan adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Undang-Undang ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan agar dapat hidup layak. Implementasi undang-undang ini diwujudkan dalam berbagai program sosial yang bertujuan langsung membantu keluarga rentan.

Salah satu program unggulan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.

Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. PKH sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Menurut buku pedoman Program Keluarga Harapan (PKH) pembagian kriteria ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut: Kriteria komponen kesehatan meliputi: ibu

hamil/menyusui; Dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam)tahun., Kriteria komponen pendidikan meliputi: Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Atau Sederajat; Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Atau Sederajat; Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Atau Sederajat; Dan Anak Usia 6 (Enam) Sampai dengan 21Tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun., Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi: Lanjut Usia Mulai Dari 60 Tahun; dan Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

D. Arah Pengembangan Kebijakan dan Praktik ke Depan

Keluarga rentan merupakan kelompok yang menghadapi tantangan struktural dan psikososial dalam menjalankan peran pengasuhan anak. Kategori keluarga rentan bisa mencakup keluarga miskin, orang tua tunggal, keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, keluarga yang terdampak bencana, atau yang mengalami kekerasan dan trauma. Dalam menghadapi kerentanan ini, diperlukan intervensi kebijakan dan praktik pengasuhan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan

Arah pengembangan kebijakan ke depan mengharuskan intervensi berbasis keluarga agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengasuh melalui pendekatan holistik. Intervensi yang efektif harus menyentuh aspek emosional dan keterampilan pengasuhan orang tua melalui pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengintegrasikan dukungan ekonomi, psikososial, dan edukasi sangat penting.

Implementasi

- Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

  Dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terbukti menjadi model penguatan keluarga rentan yang berhasil. PUSPAGA mampu memberikan ruang aman bagi keluarga untuk belajar dan berdiskusi seputar pola asuh, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengelolaan konflik.

- Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

  Bengkulu mengembangkan forum keluarga untuk menangani anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang mendukung keterlibatan emosional antara orang tua dan anak.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

  Penguatan program parenting pada program (PKH) memberikan edukasi dasar kepada orang tua, namun tantangannya terletak pada pendampingan yang konsisten dan kontekstualisasi materi agar relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu menekankan pada pelatihan pendamping sosial yang mampu menjadi fasilitator pengasuhan, bukan hanya penyalur bantuan.

Secara keseluruhan, penguatan pengasuhan keluarga rentan membutuhkan kolaborasi lintas sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, serta partisipasi aktif masyarakat. Intervensi ke depan harus mengarah pada pembangunan sistem pendukung keluarga yang meliputi edukasi pengasuh, pendampingan profesional, regulasi berbasis hak anak, serta keberpihakan pada kelompok marginal.

Hal ini akan menciptakan lingkungan keluarga yang aman, mendukung, dan memberdayakan, sehingga anak-anak dari keluarga rentan pun dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial.

E. Penutup dan Refleksi Akhir

Pengasuhan responsif dan berkeadilan sosial merupakan pondasi utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan yang hangat, empatik, dan adil antara pengasuh dan anak, dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan pendekatan holistik melalui model intervensi berbasis keluarga dan komunitas berperan sebagai ekosistem pendukung. Sinergi ini tidak hanya memperkuat kapasitas pengasuhan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi anak-anak.

Pemetaan terhadap kebijakan dan program pemerintah menunjukkan adanya berbagai inisiatif yang mendukung pengasuhan anak, namun implementasinya masih sering terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antar sektor dan peningkatan koordinasi di tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi program menjadi kunci untuk memastikan kebijakan benar-benar responsif terhadap kebutuhan nyata keluarga.

Ke depan, arah pengembangan kebijakan dan praktik pengasuhan harus lebih adaptif, berbasis bukti, dan mengedepankan partisipasi masyarakat. Pengasuhan kapasitas keluarga, inovasi layanan sosial, pemanfaatan teknologi,

serta pengembangan model-model praktik baik lokal yang dapat direplikasi secara nasional menjadi langkah strategis yang perlu diambil. Dengan demikian, pengasuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen bersama lintas sektor dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya.

PENUTUP

Dalam penutup buku Pengasuhan dalam Keluarga Rentan: Strategi, Tantangan, dan Harapan, kami ingin menegaskan kembali pentingnya pengasuhan yang responsif dan berkeadilan sosial dalam mendukung perkembangan anak-anak dari keluarga yang menghadapi kerentanan. Setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangan unik yang mempengaruhi pola asuh, dan pemahaman yang mendalam tentang konteks ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

Refleksi akhir ini mengingatkan kita bahwa pengasuhan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan komitmen bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial. Keluarga rentan sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan, dan oleh karena itu, intervensi yang holistik dan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk memutus siklus tersebut.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi para pembaca, serta mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi anak-anak. Dengan dukungan yang tepat, setiap anak, terlepas dari latar belakang keluarganya, memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Akhir kata, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga rentan, sehingga kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik

bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam upaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azanella, L. A., & Marlina, R. (2023). Disabilitas dan kemiskinan ekstrem di Indonesia: Analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020. ResearchGate.

Murray, L. K., Nguyen, A., & Cohen, J. A. (2021). Understanding orphans and vulnerable children globally: Impacts of HIV/AIDS and armed conflict. Global Mental Health Review, 4(2), 75–89.

Putri, D. P., Yulia, A., & Rahmawati, F. (2021). Family vulnerability and children's nutritional status during COVID-19 pandemic. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 16(3), 112–120.

Simatupang, N. E., Wulandari, S., & Nuraini, R. (2023). Analisis dukungan sosial masyarakat terhadap kesejahteraan kelompok rentan. Jurnal Pemberdayaan Sosial, 5(1), 45–59.

UNICEF & World Health Organization. (2022). Progress on children's wellbeing: The global state of vulnerable families. Geneva: WHO.

Widyastuti, L. R. (2020). Hubungan karakteristik keluarga kurang mampu dengan kejadian stunting pada balita di Kota Semarang. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, 8(2), 134–140.

Mawarpury, M., & Mirza, M. (2017). Resiliensi dalam keluarga: perspektif psikologi. Psikoislamedia: Jurnal Psikologi, 2(1), 96-106.

Lubis, M., & Dewi, R. S. (2021). Resilience in Early Childhood. Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 6(1), 1069-1077.

Anisah Cahyaningtyas, Asih Amperiana Tenrisana, D. (2016). Pembangunan Ketahanan keluarga (Cet. 1). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fatchurrohman, F. (2012). Pendidikan Moral dalam Keluarga Modern: Perspektif Ekologi Sosial. MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 4(1), 31-51.

Etikawati, A. I., Siregar, J. R., Widjaja, H., & Jatnika, R. (2019). Mengembangkan konsep dan pengukuran pengasuhan dalam perspektif kontekstual budaya. Buletin Psikologi, 27(1), 1-14.

Mardia, R. (2024). Internalisasi Nilai Pendidikan Multibudaya Pada Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Pengasuhan Ekologi Urie Bronfenbrenner dan Signifikansinya terhadap Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Al-Marifah| Journal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 4(2), 219-231.

Sari, R. M., & Fitriani, S. (2019). Implementasi Model Pembelajaran Sentra dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Education and Guidance: Counseling Development Journal (EGCDJ), 1(2), 86–98.

Fitriyani, L. (2015). Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak. Lentera, 18(1), 93–104.

Sutrisno, S. (2022). Ekologi Perkembangan Anak, Ekologi Keluarga, Ekologi Sekolah dan Pembelajaran. ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan, 4(1), 1–14.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). Kebijakan Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak.

Farber, M. J., Gee, D. G., & Hariri, A. R. (2022). Normative range parenting and the developing brain: A scoping review and recommendations for future research. The European journal of neuroscience, 55(9-10), 2341–2358.

Reivich, K., & Shatte, A. (2003).The resilience factor: 7 keys to finding your inner strength and overcoming life's hurdles. Harmony.

Fernandez, I. M. F., & Sudagijono, J. S. (2018). Resiliensi pada wanita Dewasa Madya Setelah kematian Pasangan Hidup. EXPERIENTIA: Jurnal Psikologi Indonesia,6 (1), 27- 38.

Kurtz-Nelson, E., & McIntyre, L. L. (2017). Optimism and positive and negative feelings in parents of young children with developmental delay.Journal of Intellectual Disability Research,61(7), 719-725.

Iganingrat, A., & Eva, N. (2021). Kesejahteraan psikologis pada ibu tunggal: sebuah literature review. In Seminar Nasional Psikologi dan Ilmu Humaniora (SENAPIH),1 (1), 444 - 451.

Amaya, S. N., Mubarak, A. & Raharja, R.M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikanvolume.2,No.4,halaman116125.DOI

Budi Andayani & Koentjoro, 2004. Peran ayah menuju coparenting, Yogyakarta Citramedia.

Dewi, S., Listyowati, D. & Napitupulu, B.E. (2019).Dampak Ekonomi Dari Migrasi: Kasus Di Indonesia Jurnal Mitra - journal.universitassuryadarma.ac.id

Dubois, B & Milley, 1992. Social Work An Empowering Proffesion, Boston: Allyn and Bacon

Prasetyo, D.T. (2024). Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran: Sebuah Studi Literatur. JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Vol.04 No.02, halaman 58-61.DOI: doi.org/10.21009/JKKP.042.01

Purwatiningsih. S. (2016). Respon Anak-Anak Migran Terhadap Migrasi Internasional Di Pedesaan Ponorogo. Populasi Volume 24, Nomor 1, halaman 57-71. https://journal.ugm.ac.id/populasi/article/view/23695/15631

Wardani, R.K. Pujiastuti, E. & Mulyani, T. (2019)..Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi. SIJALU-Sistem Informasi Jurnal Ilmiah. https://core.ac.uk/download/pdf/228865475.pdf

International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2010). *Situational Analysis of Children of Migrant Workers in Indonesia*. IOM Indonesia. https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1491/files/documents/Summary%20Documents%20%20FGD%20on%20Migrant%20Workers%20Children.pdf

UNICEF Indonesia. (2011). *Children Left Behind: The Impact of Migration on Children in Indonesia*. UNICEF. https://www.unicef.org/documents/children-left-behind

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2020*. https://djppi.kominfo.go.id/storage/file/file_publication/lap

tah/laptah%20kominfo%20fnal%20dengan%20ISBN%20rev%20final%20juni%202021.pdf

Wahyuni, S. (2019). *Dampak Sosial Ekonomi TKI terhadap Anak-Anaknya di NTB*. Jurnal Sosial dan Masyarakat, 7(2), 134-148.

Nopitasari, R., & Imelda, J. D. (2018). *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak: Studi Deskriptif pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Laki-Laki di Lombok Timur*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 18(1).

Nurdin, A. A., Mawaddah, A. R., Abdullah, P. A., Yadilla, N., & Aini, Q. (2024). Pengaruh Keterbatasan Akses Pendidikan Terhadap Tingginya Angka Putus Sekolah Dikaitkan Dengan SDGs. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(9).

Anggraini, R, A., & Wijayaningsih, L. (2023)

PENGARUH POLA ASUH PERMISIF TERHADAP SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK TARBIYATUL BANIN II SALATIGA. Jurnal Pendas: Pendidikan Dasar, 8(3).

Darmawati, & Ikrimah, I. (2022). Pola asuh permisif orang tua terhadap kedisiplinan anak usia dini. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 5(2), 115–124.

Nurli, S, H., Chotimah, P., & Wahyuni, D. (2023). Pengaruh Pola Asuh Permisif terhadap Kemandirian Anak Usia Dini. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), 256–262.

Ramadanty, A., Putriani, P., Hibana, H., Na'imah, N., Ayu S, M., (2022). Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini di TK Al-Hidayah Kabupaten Bone. Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 5(2), 1-82.

Nurhayati, S. (2023). DAMPAK POLA ASUH PERMISIF TERHADAP PERKEMBANGAN NILAI AGAMA DAN MORAL ANAK USIA

DINI. WALADUNA : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 6(1), 36–44.

Laik, A. A., & Nixon, G. (2022). Iman Rahab: Sebuah Refleksi Teologis Terhadap Iman Kaum Marginal. Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral, 3, 62-75.

Wahidin, U. (2017). Literasi Keberagamaan Anak Keluarga Marjinal Binaan Komunitas di Kota Bogor. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 6(02), 14-14.

Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). *Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma*. Sanata Dharma University Press.

Wulandari, H., & Shafarani, M. U. D. (2023). Dampak fatherless terhadap perkembangan anak usia dini. Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 12(1), 1-12.

Astuti, A., & Murdiati, A. (2020). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental ibu rumah tangga. Jurnal Sosial dan Kesejahteraan, 18(1), 45–59.

Dewi, N. R., & Rachmawati, I. (2021). Kelekatan emosional ibu-anak dalam keluarga korban KDRT. Jurnal Psikologi dan Perkembangan Anak, 7(1), 23–35.

Hadi, S., & Putri, M. A. (2021). Intergenerational transmission of domestic violence: Studi pada remaja korban kekerasan rumah tangga. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(2), 102–118.

Htun, M., & Weldon, S. L. (2018). The logics of gender justice: State action on women's rights around the world. Cambridge University Press.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) & Komnas Perempuan. (2021). Laporan

pemantauan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia. Jakarta: KPPPA.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Evaluasi sistem rujukan terpadu untuk anak korban kekerasan: Tantangan dan rekomendasi kebijakan. Jakarta: KPAI.

Komnas Perempuan. (2022). Lembaga layanan perempuan dan anak: Tantangan dan inovasi dalam penanganan kasus kekerasan. Komnas Perempuan.

Laeliya, N. (2014). Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) Di Provinsi DIY (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA).

Maisyaroh, A. N. (2021). Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul (Doctoral dissertation, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Rahmawati, A., & Fitriani, D. (2019). Peran multi-stakeholder dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Jurnal Sosial dan Kependidikan, 12(1), 78-95.

Saputro, E. W., & Handayani, T. (2022). Efektivitas kerja sama Unit PPA Polri dengan LSM dalam penanganan kekerasan berbasis gender. Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, 8(3), 112-130.

Sari, Y., & Kurniawati, D. (2021). Rehabilitasi pengasuhan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga: Studi intervensi berbasis komunitas. Jurnal Psikologi Intervensi, 9(2), 78–90.

UN Women. (2021). Collaborative approaches to ending gender-based violence: A global perspective. United Nations.

Wahyuni, S. (2020). Sinergitas lembaga layanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan: Studi kasus di P2TP2A Jawa Tengah. Jurnal Perempuan dan Anak, 5(2), 45-60.

Wahyuni, T. (2022). Dampak psikososial anak dari keluarga dengan riwayat kekerasan. Jurnal Kesehatan Mental Anak dan Remaja, 3(1), 30–42.

World Health Organization (WHO). (2020). Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines. WHO.

Giallo, R., & Gavidia-Payne, S. (2006). Child, parent and family factors as predictors of adjustment for siblings of children with a disability. Journal of Intellectual Disability Research, 50(12), 937–948.

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Simon & Schuster.

Mugno, D., Ruta, L., D'Arrigo, V. G., & Mazzone, L. (2007). Impairment of quality of life in parents of children and adolescents with pervasive developmental disorder. Health and Quality of Life Outcomes, 5, 22.

Phelps, K. W., Hodgson, J. L., McCammon, S. L., & Lamson, A. L. (2009). Caring for children with autism: The experiences of mothers in Greece. Qualitative Health Research, 19(4), 446–457.

Burrell, A. M., & Borrego, J. (2012). Parents' involvement in treatment for childhood conduct problems: Does parenting alliance matter?. Behavior Therapy, 43(2), 329–340.

Fish, W. W. (2016). Perceptions of parents of students with autism towards the IEP meeting: A case study of one family support group chapter. Education, 137(3), 272–280.

Wieland, N., Green, S., Ellingsen, R., & Baker, B. L. (2014). Parent-child problem solving in families of children with or without intellectual disability. *Journal of Intellectual Disability Research*, *58*(1), 17–30.

Kyzar, K., Turnbull, A. P., Summers, J. A., & Gómez, V. A. (2012). The relationship of family support to family outcomes: A synthesis of key findings from research on severe disability. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 37(1), 31–44.

Gowda, C., Schaffer, S. E., Dombkowski, K. J., & Dempsey, A. F. (2012). BMC Public Health Understanding attitudes toward adolescent vaccination and the decision-making dynamic among adolescents, parents and providers. In *BMC Public Health* (Vol. 12).

Blume, W. T. (2004). Lennox-Gastaut syndrome: Potential mechanisms of cognitive regression. In *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews* (Vol. 10, Issue 2, pp. 150–153).

Ruppar, A. L., & Arndt, K. (2017). Perspectives on critical issues in the preparation of inclusive educators. Handbook of Research on Teacher Education and Professional Development, 198–213.

Brookings Institution. (2025). What we can learn from families of children with disabilities about inclusive family, school, and community engagement.

Parent perspectives on inclusive education for students with intellectual disability: A scoping review of the literature. PMC - PubMed Central.

Parenting a child with disability: A mother's reflection on the significance of social support. PMC - PubMed Central.

The Relationship of Family Support to Family Outcomes_ A Synthesis of Key Findings from Research on Severe Disability - Kathleen B. Kyzar, Ann P. Turnbull, Jean Ann Summers, Viviana Aya Gómez, 2012. (n.d.).

Nakken, N., Spruit, M. A., van den Bogaart, E. H. A., Crutzen, R., Muris, J. W. M., Wouters, E. F. M., & Janssen, D. J. A. (2019). Identifying causes of perceptual differences in problematic activities of daily life between patients with COPD and proxies: A qualitative study. *Australian Occupational Therapy Journal*, *66*(1), 44–51.

Blume, W. T. (2004). Lennox-Gastaut syndrome: Potential mechanisms of cognitive regression. In *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews* (Vol. 10, Issue 2, pp. 150–153).

Application of Molecular Biology and Genomics of Probiotics for Enteric Cytoprotection _ SpringerLink, n.d.

Wieland, N., Green, S., Ellingsen, R., & Baker, B. L. (2014). Parent-child problem solving in families of children with or without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 58(1), 17–30.

Santika, N., Pramudyasmono, H. G., & Himawati, I. P. (2024). Peran PKBI bengkulu dalam penguatan kapasitas pengasuhan orang tua bagi anak berhadapan dengan hukum. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 10(2), 251-261. Dallaire, D. H. (2007). Incarcerated mothers and fathers: A

comparison of risks for children and families. *Family relations*, *56*(5), 440-453.

Davis, L., & Shlafer, R. J. (2017). Mental health of adolescents with currently and formerly incarcerated parents. *Journal of adolescence*, *54*, 120-134.

Johnson, E. I., & Waldfogel, J. (2002). Parental incarceration: Recent trends and implications for child welfare. *Social Service Review*, *76*(3), 460-479.

Devin. N., Nasrudin., Siti. U. (2023). *Hubungan PenerimaanKeluarga dengan Stigma Keluarga pada Anggota Ganggu Jiwa.*STIKES Yarsi Mataram. Mataram Romli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1997).

Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016).

R. Abdussalam & Adri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK Press Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika

Amalia, G., & Aprianty, R. A. (2023). *Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri Anak Binaan*. Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi, 3(2), 16–23.

Supandi, K. D. (2024). *Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikuensi*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(11), 345–353.

Meisyahrul, A. (2024). *Peran Keluarga dan Lingkungan dalam Proses Reintegrasi Anak Binaan*. Journal of Correctional Studies, 1(1), 72–83

Arriani, F. (2014). Perilaku agresif anak usia dini. Jurnal Pendidikan Usia Dini, 8(2), 269-280.

Tempo.co. (2023, Agustus 30). Kecanduan judi online bikin ayah satu anak menggadaikan kamera, laptop perusahaan tempat bekerja. Tempo.co.

BIODATA EDITOR

Dhian Gowinda Luh Safitri, S.Pd., M.Ed.

Dhian Gowinda Luh Safitri adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang mengkhususkan diri pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Lahir di Madiun pada 4 April 1993, ia menempuh pendidikan sarjana di Unesa dan meraih gelar Master of Education dari Monash University, Australia. Ia aktif mengajar, meneliti, dan mengembangkan media pembelajaran inovatif untuk anak usia dini, seperti *unplugged coding*, outdoor learning, dan modul edukasi lingkungan. Produktif dalam publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat, Dhian dikenal sebagai pendidik muda yang menggabungkan kreativitas, teknologi, dan nilai-nilai budaya dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Prof. Dr. Dra. Gunarti Dwi Lestari, M.Si.

Prof. Dr. Dra. Gunarti Dwi Lestari adalah Guru Besar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang memiliki spesialisasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Luar Sekolah. Lahir di Semarang pada 12 Juli 1961, beliau telah mendedikasikan lebih dari tiga dekade untuk pendidikan, riset, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitiannya meliputi literasi budaya anak usia dini, strategi parenting berbasis bukti, hingga konservasi nilai lokal melalui pembelajaran. Dengan ratusan publikasi, berbagai buku ajar, dan hak cipta di bidang media pendidikan, Prof. Gunarti dikenal sebagai akademisi

visioner yang konsisten mengembangkan konsep pengasuhan dan pendidikan yang inklusif, berakar pada budaya, namun adaptif terhadap perkembangan zaman.